

Rumusan Aksi Prioritas Perlindungan Lingkungan Hidup

(BUDGET TAGGING URUSAN LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERTANIAN
PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA DALAM PENCAPAIAN
KINERJA LINGKUNGAN HIDUP)



Disusun oleh
HASYMI RINALDI
FIRDAUS

RINGKASAN EKSEKUTIF

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Mencapai Target Kontribusi Nasional (National Determined Contribution/NDC) merupakan komitmen pemerintah dalam menghadapi dampak perubahan iklim. NDC menetapkan target konkret yang harus dicapai dalam mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Komitmen dalam mengimplementasikan NDC dapat memperkuat posisi pada pasar global yang semakin berorientasi pada rendah karbon. Inovasi dalam teknologi hijau dan praktek bisnis yang berkelanjutan dapat meningkatkan daya saing internasional dalam jangka panjang. Maka dari itu pembangunan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup merupakan bagian dari kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Emisi GRK, seperti karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dan nitrogen oksida (NO_x), merupakan kontributor utama terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Dalam banyak literature emisi GRK juga menjadi salah satu faktor dalam mempengaruhi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Tingkat emisi GRK yang tinggi cenderung memiliki dampak terhadap lingkungan yang berimplikasi pada penurunan target IKLH. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan GRK dan IKLH sebagai indikator kinerja utama. Pada 2026 ditargetkan persentase penurunan GRK sebesar 27,99% sedangkan IKLH meningkat menjadi 73,21.

Guna mencapai tujuan tersebut diperlukan langkah yang strategis oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mencapai target yang ditentukan. Melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang berkolaborasi dengan USAID *Sustainable Environmental Governance Across Regions* (SEGAR merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang strategis dalam menurunkan persentase GRK dan meningkatkan target IKLH. Agenda ini juga melibatkan stakeholder Pemerintah Kabupaten Sintang, Ketapang, Kubu Raya dan Sanggau yang menjadi locus proyek USAID SEGAR.

Agenda tersebut mengidentifikasi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang strategis antara kewenangan provinsi dan kabupaten dalam menurunkan emisi GRK dan meningkatkan IKLH. Kemudian membangun sinergitas yang memperkuat fungsi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Indikator kinerja pada program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diidentifikasi ini melihat relasi antara urusan bidang pertanian, urusan bidang kehutanan, urusan bidang lingkungan hidup, dan urusan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi variable penting dalam sinergitas ini.

Harapannya, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi program-program pemerintah daerah baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Terutama dalam mengevaluasi pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah yang mencakup analisis terhadap kinerja dan efektivitas kebijakan dalam mencapai penurunan emisi GRK dan peningkatan target IKLH. Laporan ini juga penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat optimalisasi program dalam mencapai komitmen pembangunan yang berkelanjutan dan Target Kontribusi Nasional (National Determined Contribution/NDC).

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
I. Pendahuluan.....	1
Tujuan	1
II. Metode.....	2
A. Identifikasi sumber-sumber masalah yang dapat mempengaruhi IKLH dan GRK.....	2
B. Inventarisir Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan-Urusan yang Mempengaruhi IKLH dan GRK	3
C. Penentuan Sub-Sub Kegiatan Prioritas dalam Mengatasi Masalah Utama	4
D. <i>Budget Tagging</i> (Penandaan Anggaran)	6
III. Hasil dan Pembahasan	8
A. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan-Urusan yang Mempengaruhi IKLH dan GRK	8
A.1. Provinsi	8
A.2. Kabupaten/ Kota	10
IV. Sub-Sub Kegiatan Prioritas	20
A. Provinsi	20
A.1. Urusan Pertanian	20
B. Kabupaten/ Kota	21
B.1. Urusan Pertanian	22
B.2. Urusan Lingkungan Hidup.....	24
V. Membangun Sinergitas Sub Kegiatan Provinsi-Kabupaten/Kota	29
A. Urusan Pertanian	29
B. Urusan Lingkungan Hidup.....	30
VI. Kesimpulan.....	32
Daftar Pustaka	34
Lampiran Budget Tagging GRK dan IKLH.....	35
A. Urusan Lingkungan Hidup Provinsi	36
B. Urusan Pertanian Provinsi	50
C. Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	67
D. Urusan Pertanian Kabupaten/ Kota.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pengelompokan Urusan dan Dinas Provinsi dan Kabupaten/ Kota	3
Tabel 2. Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan per Urusan Provinsi dan Kabupaten/ Kota	4
Tabel 3. Contoh Budget Tagging Urusan Pertanian-Provinsi	7
Tabel 4. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pertanian Provinsi yang dianggap berpengaruh terhadap GRK dan IKLH	9
Tabel 5. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pertanian yang dianggap berpengaruh terhadap GRK dan IKLH.....	11
Tabel 6. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup yang dianggap berpengaruh terhadap GRK dan IKLH	16
Tabel 7. Jumlah Kategori Sub Kegiatan Urusan Pertanian dan Urusan Lingkungan Hidup Provinsi	20
Tabel 8. Urutan Prioritas dan Skor Masing-Masing Sub Kegiatan Urusan Pertanian Provinsi.....	21
Tabel 9. Jumlah Kategori Sub Kegiatan Urusan Pertanian dan Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota.....	21
Tabel 10. Urutan Prioritas dan Skor Masing-Masing Sub Kegiatan Urusan Pertanian Kabupaten/ Kota	22
Tabel 11. Urutan Prioritas dan Skor Masing-Masing Sub Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota.....	24
Tabel 12. Bridging Sub Kegiatan Urusan Pertanian Provinsi-Kabupaten/Kota.....	29
Tabel 13. Bridging Sub Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Provinsi-Kabupaten/Kota	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Forecast dan Target IKLH 2026	1
Gambar 2. Sumber Masalah IKLH dan GRK.....	3
Gambar 3. Jumlah Sub Kegiatan Urusan Pertanian Provinsi terhadap Sumber Utama GRK dan IKLH ..	8
Gambar 4. Jumlah Sub Kegiatan Urusan Pertanian Kabupaten/ Kota terhadap Sumber Utama GRK dan IKLH	10
Gambar 5. Jumlah Sub Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota terhadap Sumber Utama GRK dan IKLH.....	15

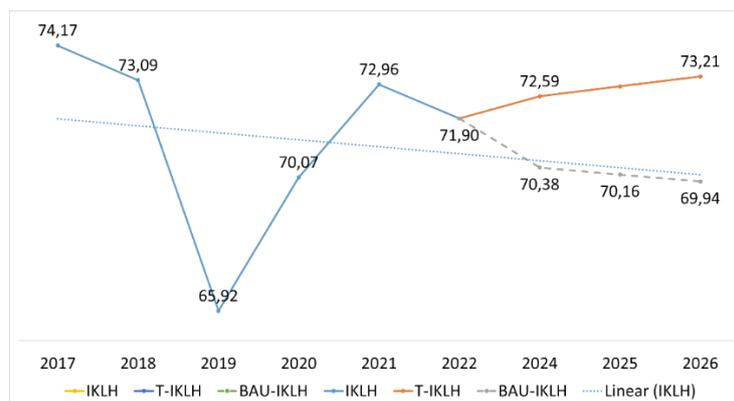
I. PENDAHULUAN

Di Kalimantan Barat, aksi penurunan emisi GRK telah berlangsung sejak 2020 melalui Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Melalui Pergub tersebut, 4 (empat) bidang yang diamanahkan untuk menjalankan aksi dalam mencapai target yang telah ditentukan, yaitu (1) Bidang Pertanian, (2) Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut, (3) Bidang Energi, dan (4) Bidang Limbah.

Namun, sebelum 2020, wacana penurunan emisi GRK diprovinsi Kalimantan Barat setidaknya sudah hadir pada RPJMD 2013-2018 dan dilanjutkan kembali pada RPJMD 2018-2024. Emisi GRK dianggap sebagai masalah utama pembangunan pada dua dokumen perencanaan pembangunan tersebut. Namun, penurunan emisi GRK tidak menjadi indikator kinerja utama. Bahkan, pada RPJMD 2013-2018, IKLH pun tidak dijadikan sebagai bagian Indikator Kinerja Utama pembangunan daerah. IKLH baru dijadikan sebagai indikator kinerja utama pada RPJMD 2018-2024, meskipun pada dokumen tersebut target penurunan emisi GRK hanya tercantum pada target program pada urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.

RPD 2024-2026, GRK kembali menjadi sebagai masalah utama pembangunan. Berbeda dengan dua dokumen perencanaan pembangunan sebelumnya, kali ini GRK dijadikan sebagai indikator kinerja utama, bersamaan dengan target peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup. Pada 2026, diharapkan terjadi Persentase Penurunan Gas Rumah Kaca sebesar 27,99%. Sedangkan IKLH meningkat menjadi 73,21.

Berdasarkan target yang ingin dicapai pada 2026, diperlukan tindakan yang strategis oleh perangkat daerah terkait, mengingat berdasarkan tren IKLH pada tahun-tahun sebelumnya, adanya kecenderungan penurunan indeks ditahun 2026 menjadi 69,94. Tersisa waktu selama 3 tahun bagi perangkat daerah terkait untuk memastikan agar target yang tercantum pada RPD 2024-2026, sebesar 73,21 dapat terpenuhi¹.



Gambar 1. Forecast dan Target IKLH 2026

Untuk memastikan agar aksi yang berlangsung cukup strategis dalam mencapai target yang diinginkan, maka diperlukan rumusan tentang program, kegiatan, dan sub kegiatan yang strategis dalam mengintervensi masalah yang teridentifikasi.

Tujuan

1. Identifikasi program, kegiatan, dan sub kegiatan STRATEGIS dalam mempengaruhi IKLH dan Emisi GRK
2. Membangun sinergitas antara urusan PROVINSI dengan KABUPATEN/ KOTA

¹ Pada GRK tidak dapat dilakukan analisis serupa karena tidak tersedianya data

II. METODE

Dalam mencapai tujuan, beberapa metode yang dilakukan yaitu;

A. Identifikasi sumber-sumber masalah yang dapat mempengaruhi IKLH dan GRK

Yang membedakan antara GRK dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terletak pada formula yang digunakan sehingga menghasilkan angka yang dijadikan target. Sedangkan aksi untuk menurunkan emisi GRK dan meningkatkan IKLH tak jauh berbeda.

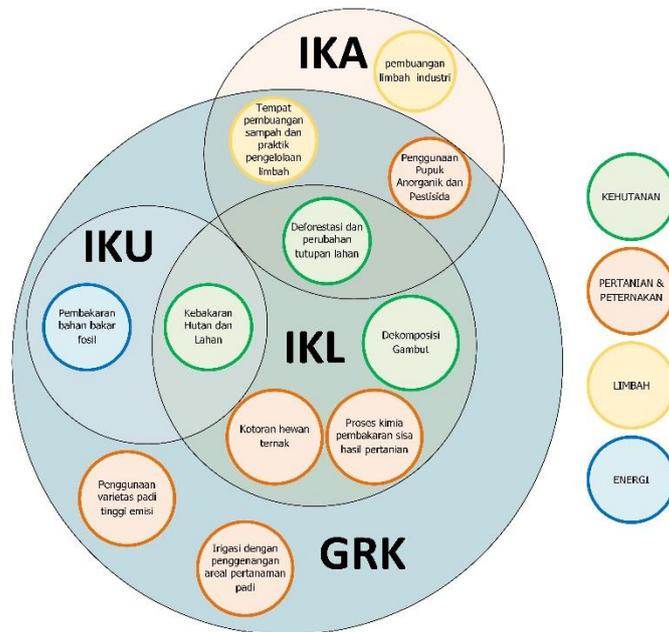
Hasil studi literatur yang dilakukan, menunjukkan bahwa 10 dari 11 sumber yang mempengaruhi IKLH juga berdampak pada emisi GRK, yaitu

1. Deforestasi dan perubahan tutupan lahan (Koaksi Indonesia; Krisnawati et al. 2015; Kurniarahma et al. 2020; Detikcom 2021)
2. Kebakaran Hutan dan Lahan (Annisa dan Nursyamsi 2017a)
3. Pembakaran bahan bakar fosil (Koaksi Indonesia; Kurniarahma et al. 2020)
4. Dekomposisi Gambut (Annisa dan Nursyamsi 2017b)
5. Proses kimia pembakaran sisa hasil pertanian dan gas metana kotoran hewan ternak (Koaksi Indonesia; Wahyudi 2019; Kurniarahma et al. 2020)
6. Tempat pembuangan sampah dan praktik pengelolaan limbah menghasilkan emisi metana (Koaksi Indonesia; Idrus 2014; Wahyudi 2019; Kurniarahma et al. 2020)
7. Penggunaan air irigasi dengan penggenangan areal pertanaman padi secara terus-menerus (Mambu 2012; Firmansyah 2022)
8. Penggunaan Pupuk Anorganik dan Pestisida (Mambu 2012; Idrus 2014; Wihardjaka et al. 2020; Firmansyah 2022)
9. Gas metana (CH₄) pada kotoran ternak (Firmansyah 2022)
10. Penggunaan varietas padi tinggi emisi (Firmansyah 2022)

Sedangkan IKLH, selain 10 sumber tersebut, juga dipengaruhi oleh kualitas air yaitu diakibatkan oleh;

1. Pencemaran air akibat penggunaan pestisida yang berlebihan dalam waktu yang lama (Idrus 2014; Detikcom 2021)
2. sungai sangat kotor oleh sampah karena digunakan sebagai tempat pembuangan sampah (Idrus 2014; Detikcom 2021)
3. pembuangan limbah industri ke dalam sungai dapat menyebabkan berubahnya susunan kimia, bakteriologi, serta sifat fisik air (Idrus 2014; Detikcom 2021; Pratiwi 2021)
4. Salah satu dampak negatif yang muncul dari keberadaan Pabrik Kelapa Sawit Terhadap sumber daya alam salah satunya adalah pencemaran sungai akibat pihak perusahaan membuang limbahnya ke sungai tanpa mengetahui zat-zat yang terkandung di dalam limbah tersebut padahal limbahnya mengandung bahan berbahaya dan beracun (K et al. 2021).

Mengacu pada sumber-sumber masalah yang berakibat pada IKLH dan GRK, maka setelah dioverlay sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2 menunjukkan bahwa satu aksi dapat mempengaruhi lebih dari 1 indikator kinerja utama. Semisal, Penanganan pada Kebakaran Hutan dan Lahan, tidak hanya berdampak pada Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan, namun juga berdampak pada menurunnya emisi GRK.



Gambar 2. Sumber Masalah IKLH dan GRK

B. Inventarisir Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan-Urusan yang Mempengaruhi IKLH dan GRK

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, terdapat 4 bidang yang diamanahkan utk menurunkan emisi GRK, yaitu (1) Bidang Pertanian, (2) Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut, (3) Bidang Energi, dan (4) Bidang Limbah. Mengacu pada 4 bidang tersebut, maka urusan pemerintah daerah berdasarkan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dikelompokkan menjadi;

Tabel 1. Pengelompokan Urusan dan Dinas Provinsi dan Kabupaten/ Kota

Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2020	Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	OPD Provinsi	OPD Kabupaten
1	2	3	4
Pertanian	Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> Dinas Perkebunan dan Peternakan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Ketahanan Pangan 	<ol style="list-style-type: none"> Dinas Pertanian dan Perkebunan (Sintang) Dinas Perkebunan dan Peternakan (Sanggau) Dinas Perkebunan dan Peternakan (Kubu Raya) Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (Ketapang)
Kehutanan dan Lahan Gambut	Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup
Limbah	Lingkungan Hidup		

Energi	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral	
--------	--------------------------------	--	--

Inventarisir program, kegiatan, dan sub kegiatan dilakukan melalui FGD (12-13 Juni 2024) bersama dengan FGD terkait sebagaimana tercantum pada Tabel 1 kolom 3 dan 4². Peserta FGD diminta untuk menginventarisir sub-sub kegiatan yang dianggap mempengaruhi masalah utama/ sumber penyebab pada GRK dan IKLH. Masalah utama/ sumber penyebab GRK dan IKLH merupakan hasil identifikasi sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2, yaitu;

1. Kotoran hewan ternak
2. Proses kimia pembakaran sisa hasil pertanian
3. Irigasi dengan penggenangan areal pertanaman padi
4. Penggunaan varietas padi tinggi emisi
5. Penggunaan Pupuk Anorganik dan Pestisida
6. Kebakaran Hutan dan Lahan
7. Deforestasi dan perubahan tutupan lahan
8. Dekomposisi Gambut
9. Pembuangan limbah industri
10. Tempat pembuangan sampah dan praktik pengelolaan limbah
11. Pembakaran bahan bakar fosil

Disamping itu, peserta juga diminta untuk menyebutkan kebutuhan yang perlu disediakan oleh OPD tingkat provinsi ataupun kabupaten/ kota agar sub kegiatan tersebut berhasil dilaksanakan.

C. Penentuan Sub-Sub Kegiatan Prioritas dalam Mengatasi Masalah Utama

Kegiatan dilakukan dengan menampilkan hasil yang sudah dikompilasi oleh perangkat daerah berbeda untuk urusan yang sama. Melalui diskusi, disepakati bersama dengan perangkat daerah terkait untuk menentukan peringkat berdasarkan tingkat strategis tidaknya sub kegiatan dalam mengintervensi masing-masing masalah utama/ sumber penyebab GRK dan IKLH.

Berdasarkan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023, jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada masing-masing urusan terkait dengan IKLH dan GRK, yaitu sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2;

Tabel 2. Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan per Urusan Provinsi dan Kabupaten/ Kota

Urusan	Provinsi			Kabupaten		
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Pertanian	6	21	102	6	20	114
Lingkungan Hidup	10	17	81	10	19	94
Kehutanan	6	26	83	2	3	10
Energi dan Sumber Daya Mineral	5	79	230	2	16	35

Beberapa pertimbangan yang dijadikan dasar untuk menentukan prioritas tidaknya suatu sub kegiatan sangat tergantung dengan konteks dari sub kegiatan tersebut terhadap masalah utama/ sumber

² Ditingkat provinsi hanya dihadiri oleh (1) Dinas Perkebunan dan Peternakan, (2) Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, dan (3) Dinas Ketahanan Pangan. Sedangkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), hanya dihadiri oleh bidang yang mengurus urusan lingkungan hidup setengah hari. Dan hari berikutnya tidak hadir. Sedangkan Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral tidak hadir sama sekali.

penyebab GRK dan IKLH. Untuk mempermudah proses diskusi, sub kegiatan dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu;

1. DATA
Segala aktivitas yang terkait dengan pengumpulan dan penyediaan data dan informasi.
Kata Kunci: Data; Informasi; Analisis; Inventarisasi; Pencatatan; Identifikasi.
Dikelompokkan lagi menjadi:
 - a. Data; Jasling
 - b. Data; IKLH
 - c. Data; GRK
 - d. Data
 - e. Data; Kehati
 - f. Data; Penindakan
2. PERENCANAAN
Segala aktivitas yang bersifat perencanaan kegiatan. Dari keseluruhan dokumen perencanaan, diutamakan adalah dokumen RPPLH, kemudian KLHS, dan dilanjutkan dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.
Kata Kunci: RPPLH; KLHS; Penyusunan Dokumen; Penetapan; Pembuatan
3. KOORDINASI
Segala aktivitas yang dilakukan dengan cara koordinasi.
Kata Kunci: Koordinasi; Sinkronisasi.
Dikelompokkan lagi menjadi:
 - a. Koordinasi; Data; MHA
 - b. Koordinasi; Pemulihan
 - c. Koordinasi; Pencegahan
4. PENINGKATAN KAPASITAS
Segala aktivitas yang dimaksudkan untuk peningkatan kapasitas SDM (Aparatur, Masyarakat/ Kelompok Masyarakat). Antara Aparatur dan Kelompok Masyarakat/ Masyarakat, Kelompok Masyarakat/ Masyarakat yang diprioritaskan dibandingkan dengan kapasitas aparatur.
Kata Kunci: Pembinaan; Peningkatan Kapasitas; Bimbingan; Sosialisasi; Pendampingan.
5. PENCEGAHAN
Segala aktivitas yang bersifat pencegahan.
Kata Kunci: Pencegahan
6. PENGELOLAAN
Segala aktivitas yang bersifat penyelenggaraan kegiatan.
Kata Kunci: Pengelolaan; Pemeliharaan; Pengoperasian; Penanganan.
7. PENGAWASAN
Segala aktivitas yang bersifat pengawasan,.
Kata Kunci: Pengawasan; Evaluasi; Monitoring; Penjaminan; Penilaian Kelayakan.
8. PEMULIHAN
Segala aktivitas yang bersifat memulihkan keadaan yang rusak.
Kata Kunci: Rehabilitasi; Restorasi; Mitigasi; Adaptasi;
9. PENINDAKAN
Segala aktivitas yang bersifat menindak pelanggaran, ataupun penanganan akibat adanya kasus.
Kata Kunci: Penghentian; Remediasi; Penyelesaian Kasus; Pengaduan; Sengketa; Penanganan; Pemberantasan.
10. PERIZINAN
Segala aktivitas yang bersifat perizinan/ melibatkan pihak lain untuk terlibat dalam penyediaan jasa/ barang pada urusan terkait.
Kata Kunci: Perizinan; Izin Usaha
11. PENGADAAN
Segala aktivitas yang bersifat penyediaan barang (sarana/ prasarana)
Kata Kunci: Penyediaan; Sarana; Prasarana; Perbanyakan.

Dalam menentukan bobot, formula diperoleh dengan mempertimbangkan;

1. Banyaknya sumber utama pada GRK dan IKLH yang dapat diatasi oleh masing-masing sub kegiatan
2. Banyaknya jumlah sub kegiatan pada masing-masing sumber utama pada GRK dan IKLH
3. Peringkat/ bobot/ rating yang disepakati melalui FGD dimana masing-masing perangkat daerah memberikan peringkat berdasarkan jumlah sub kegiatan dimasing-masing

Melalui pertimbangan tersebut, maka formula yang digunakan adalah;

$$Z = X + Y$$

$$X = \frac{\sum su}{\sum SU} + \sum \frac{su}{SI}$$

$$Y = \sum \frac{sc}{SC}$$

Dimana;

- Z = Bobot prioritas sub kegiatan dalam mengatasi masalah GRK dan IKLH
 X = Kemampuan masing-masing sub kegiatan dalam mengatasi banyaknya sumber utama GRK dan IKLH
 Y = Kemampuan masing-masing sub kegiatan dalam mengatasi satu dari 11 sumber utama GRK dan IKLH (diperoleh melalui Peringkat/ bobot/ rating yang disepakati melalui FGD)
 su = Nilai sub kegiatan pada masing-masing sumber utama GRK dan IKLH
 SU = Total jumlah sumber utama GRK dan IKLH (=11)
 SI = Total nilai sub kegiatan pada masing-masing sumber utama GRK dan IKLH
 sc = Skor pada masing-masing sub kegiatan untuk masing-masing sumber utama GRK dan IKLH
 SC = Total skor dimasing-masing sumber utama GRK dan IKLH

D. Budget Tagging (Penandaan Anggaran)

Budget Tagging dilakukan dengan menyesuaikan urusan provinsi dengan kabupaten/ kota. Dalam hal ini, sub kegiatan urusan provinsi yang masuk dalam kategori GRK ataupun IKLH, memungkinkan tidak ditagging kedalam urusan kabupaten/ kota untuk sub kegiatan yang sama/ serupa. Dan juga berlaku sebaliknya, untuk kabupaten/ kota terhadap provinsi, dimana sub kegiatan pada urusan kabupaten/ kota ditagging dalam kategori GRK ataupun IKLH, namun memungkinkan tidak ditagging dalam sub kegiatan provinsi yang sama/ serupa.

Untuk menyelaraskan urusan Provinsi dengan Kabupaten/ Kota maka sub kegiatan yang sama/ serupa ditagging keduanya (untuk urusan provinsi dan kabupaten/ kota). Hasil *budget tagging* dapat dilihat pada lampiran³. Pada tabel dimaksud, untuk melihat apakah hasil tagging bersumber dari provinsi ataupun kabupaten/ kota, dapat dilihat pada kolom Bobot Prioritas. Ketika terdapat tagging pada sub kegiatan tersebut, namun bobotnya 0 (nol), maka sumber tagging tersebut diperoleh dari urusan tingkat yang berbeda.

Seperti yang ditampilkan pada Tabel 3 berikut, yang merupakan urusan Pertanian tingkat Provinsi. Pada baris pertama, sub kegiatan tersebut ditagging, dan memperoleh bobot. Artinya bahwa tagging tersebut diusulkan oleh OPD terkait dan disepakati oleh OPD lain yang terlibat dalam FGD.

Sedangkan pada baris kedua, dimana terdapat tagging, namun bobot prioritasnya adalah 0 (nol), artinya tagging tersebut berasal dari OPD Kabupaten/ Kota yang memiliki sub kegiatan yang sama dengan provinsi. Sehingga bobot prioritas dalam urusan pertanian ditingkat provinsi menjadi 0 (nol) karena tidak direkomendasikan dalam mengatasi masalah GRK/IKLH tingkat provinsi.

³ Dilampirkan pula file excel bersamaan dengan laporan ini untuk *budget tagging*

Sedangkan hasil budget tagging pada urusan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi, seluruh penandaan bersumber dari urusan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota. Hal ini dilakukan karena adanya kesamaan/ kemiripan sub kegiatan di Kabupaten/ Kota yang dianggap memiliki kemampuan dalam mengintervensi GRK dan IKLH, yang perlu didukung ditingkat provinsi melalui sub kegiatan yang sama/ serupa di provinsi. Pembobotan pada urusan lingkungan hidup provinsi tidak dapat dilakukan karena rendahnya partisipasi OPD terkait dalam proses diskusi.

Tabel 3. Contoh Budget Tagging Urusan Pertanian-Provinsi

No	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas
1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	GRK	IKA	IKL	IKU	3,348
2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	GRK	IKA	IKL	IKU	0,000

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

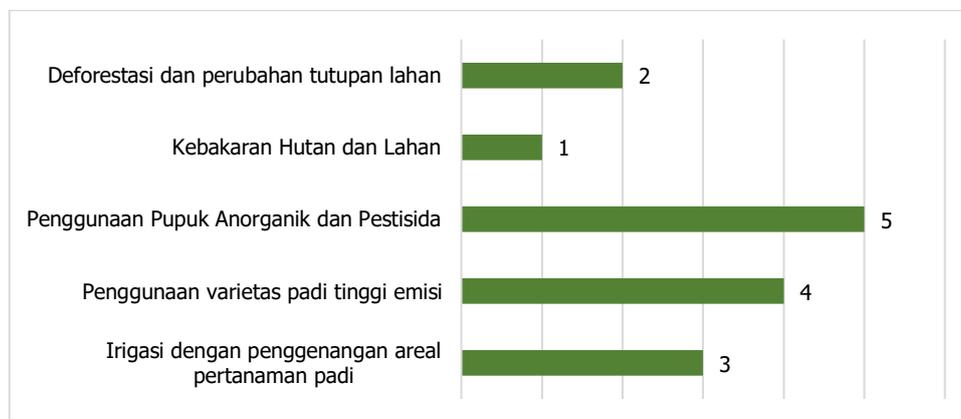
Sebagaimana yang telah ditampilkan pada Gambar 2 sebelumnya bahwa penanganan terhadap sumber-sumber IKLH juga mempengaruhi sumber-sumber GRK mengingat perubahan pada IKLH dan GRK sebagian besar dipengaruhi oleh sumber yang sama. Mengacu pada kondisi tersebut, maka intervensi perlu dilakukan terhadap sumber-sumber masalah IKLH dan GRK. Teridentifikasi sebanyak 11 sumber masalah pada IKLH, dimana 10 diantaranya adalah sumber emisi GRK.

A. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan-Urusan yang Mempengaruhi IKLH dan GRK

A.1. Provinsi⁴

1. Urusan Pertanian

Sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2, terdapat sebanyak 102 sub kegiatan pada urusan pertanian tingkat provinsi, yang terangkum kedalam 21 kegiatan dan 6 program. Dari keseluruhan sub kegiatan tersebut, sebanyak 11% (11 Sub Kegiatan) dianggap memiliki kemampuan dalam mempengaruhi GRK dan juga IKLH. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 4Tabel 5, menunjukkan bahwa sub kegiatan terbanyak mempengaruhi *Penggunaan Pupuk Anorganik dan Pestisida*, yaitu sebanyak 5 sub kegiatan. Selanjutnya adalah *Penggunaan Varietas Padi Tinggi Emisi*, yaitu sebanyak 4 sub kegiatan. Dari 11 sumber utama GRK dan IKLH, hanya 5 sumber yang dianggap dapat dipengaruhi melalui sub kegiatan pada urusan pertanian provinsi.



Gambar 3. Jumlah Sub Kegiatan Urusan Pertanian Provinsi terhadap Sumber Utama GRK dan IKLH

Sedangkan untuk masing-masing sub kegiatan yang dianggap dapat mempengaruhi sumber utama GRK dan IKLH, paling banyak sub kegiatan hanya dapat mempengaruhi 2 (dua) sumber, yaitu;

1. Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
3. Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan
4. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

⁴ Pada urusan provinsi hanya dapat menampilkan urusan pertanian, sedangkan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral tidak berpartisipasi, dan urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, tidak terlibat penuh dalam FGD yang diselenggarakan.

Tabel 4. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pertanian Provinsi yang dianggap berpengaruh terhadap GRK dan IKLH

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	GRK;	GRK;	GRK	GRK	GRK;	GRK;	GRK;	GRK;	IKA	GRK;	GRK;	JML	
			IKL	IKL			IKA	IKL;	IKL;	IKL	IKL	IKL	IKL		
			1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*	9*	10*	11*		
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						X	X					2	
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan					X							1	
		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan								X					1
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih				X								1	
		Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan				X								1	
		Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang				X								1	
		Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih				X								1	
	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian			X		X								2
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian			X		X								2
		Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan			X		X								2
		Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura					X								1

*) Keterangan

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Kotoran hewan ternak | 5. Penggunaan Pupuk Anorganik dan Pestisida | 9. Pembuangan limbah industri |
| 2. Proses kimia pembakaran sisa hasil pertanian | 6. Kebakaran Hutan dan Lahan | 10. Tempat pembuangan sampah dan praktik pengelolaan limbah |
| 3. Irigasi dengan penggenangan areal pertanaman padi | 7. Deforestasi dan perubahan tutupan lahan | 11. Pembakaran bahan bakar fosil |
| 4. Penggunaan varietas padi tinggi emisi | 8. Dekomposisi Gambut | |

A.2. Kabupaten/ Kota

1. Urusan Pertanian

Sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2, terdapat sebanyak 114 sub kegiatan pada urusan pertanian, yang terangkum kedalam 20 kegiatan dan 6 program. Dari keseluruhan sub kegiatan tersebut, sebanyak 32% (36 Sub Kegiatan) dianggap memiliki kemampuan dalam mempengaruhi GRK dan juga IKLH. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 5, menunjukkan bahwa sub kegiatan terbanyak mempengaruhi *Kebakaran Hutan dan Lahan*, yaitu sebanyak 13 sub kegiatan. Selanjutnya adalah *Perubahan Tutupan Dan Lahan*, yaitu sebanyak 11 sub kegiatan. Sedangkan pada sumber *Tempat Pembuangan Sampah dan Praktik Pengelolaan Limbah*, tidak ada sub kegiatan satu pun yang dianggap mampu mengatasi masalah tersebut.



Gambar 4. Jumlah Sub Kegiatan Urusan Pertanian Kabupaten/ Kota terhadap Sumber Utama GRK dan IKLH

Dari keseluruhan sumber masalah tersebut, terdapat 5 (lima) sub kegiatan yang dianggap mampu mengintervensi sebanyak 4 (empat) sumber masalah pada GRK dan IKLH, yaitu;

1. Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
2. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian
3. Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian
4. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian

Tabel 5. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pertanian yang dianggap berpengaruh terhadap GRK dan IKLH

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	GRK; IKL	GRK; IKL	GRK	GRK	GRK; IKA	GRK; IKL; IKU	GRK; IKA; IKL	GRK; IKL	IKA	GRK; IKA	GRK; IKU	JML
			1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*	9*	10*	11*	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						X	X					2
		Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan					X							1
		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						X						1
		Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan						X						1
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan									X			1
		Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan										X		1
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan									X			1
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian			X									1
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit			X									1
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air			X									1
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani			X									1

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	GRK; IKL	GRK; IKL	GRK	GRK	GRK; IKA	GRK; IKL; IKU	GRK; IKA; IKL	GRK; IKL	IKA	GRK; IKA	GRK; IKU	JML	
			1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*	9*	10*	11*		
	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum						X	X					2	
		Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum							X						1
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian		X					X	X					3
		Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten / Kota							X	X					2
		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten / Kota							X	X					2
		Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan		X											1
		Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota								X					1
		Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian								X					1
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			X	X	X							3	
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			X	X	X							3	
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan		X										1	

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	GRK; IKL	GRK; IKL	GRK	GRK	GRK; IKA	GRK; IKL; IKU	GRK; IKA; IKL	GRK; IKL	IKA	GRK; IKA	GRK; IKU	JML
			1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*	9*	10*	11*	
		Perbanyakkan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih				X								1
		Perbanyakkan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek				X								1
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				X		X	X	X				4
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten / Kota	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	X											1
		Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	X											1
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				X	X							2
		Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	X											1
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	X											1
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		X		X	X	X						4

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	GRK; IKL	GRK; IKL	GRK	GRK	GRK; IKA	GRK; IKL; IKU	GRK; IKA; IKL	GRK; IKL	IKA	GRK; IKA	GRK; IKU	JML
			1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*	9*	10*	11*	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten / Kota				X	X	X						3
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian					X	X			X		X	4
		Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian					X	X	X	X				4
		Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian					X	X	X	X				4
	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan										X		1
			4	4	6	8	9	13	11	3	5	0	1	64

*) Keterangan

1. Kotoran hewan ternak
2. Proses kimia pembakaran sisa hasil pertanian
3. Irigasi dengan penggenangan areal pertanaman padi
4. Penggunaan varietas padi tinggi emisi
5. Penggunaan Pupuk Anorganik dan Pestisida
6. Kebakaran Hutan dan Lahan
7. Deforestasi dan perubahan tutupan lahan
8. Dekomposisi Gambut
9. Pembuangan limbah industri
10. Tempat pembuangan sampah dan praktik pengelolaan limbah
11. Pembakaran bahan bakar fosil

2. Urusan Lingkungan Hidup

Berbeda dengan urusan pertanian, jumlah sub kegiatan pada Urusan Lingkungan Hidup yang dianggap mampu mengatasi permasalahan sumber-sumber masalah pada IKLH dan GRK lebih banyak. Tercatat sebanyak 40% (38 sub kegiatan) dari total 94 sub kegiatan yang menjadi urusan lingkungan hidup di Kabupaten/ Kota.



Gambar 5. Jumlah Sub Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota terhadap Sumber Utama GRK dan IKLH

Sebagaimana ditampilkan pada Gambar 5, jumlah sub kegiatan terbanyak yang menjadi urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten/ Kota adalah sub kegiatan yang dianggap mampu mengatasi masalah (1) Pembuangan Limbah Industri, (2) Deforestasi dan Perubahan Tutupan Lahan, dan (3) Kebakaran Hutan dan Lahan.

Dari sekian banyak sub kegiatan yang disepakati, hanya 1 (satu) sub kegiatan yang dianggap mampu mengatasi 7 sumber masalah pada GRK dan IKLH, yaitu Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK.

Tabel 6. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup yang dianggap berpengaruh terhadap GRK dan IKLH

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	GRK; IKL	GRK; IKL	GRK	GRK	GRK; IKA	GRK; IKL; IKU	GRK; IKA; IKL	GRK; IKL	IKA	GRK; IKA	GRK; IKU	JML
			1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*	9*	10*	11*	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAPIZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP(PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/ kota	Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/ kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup							X		X			2
		Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/ kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup							X		X			2
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ Kota	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan / atau Izin PPLH												X
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / Kota	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota											X	1

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	GRK; IKL	GRK; IKL	GRK	GRK	GRK; IKA	GRK; IKL; IKU	GRK; IKA; IKL	GRK; IKL	IKA	GRK; IKA	GRK; IKU	JML
			1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*	9*	10*	11*	
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKATHUKUM AD AT(MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAITDENGAN PPLH	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH							X					1
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/ kota										X		1
		Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan										X		1
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi						X						1
		Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi						X						1
		Pelaksanaan Restorasi						X						1
		Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/ kota yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota						X						1
		Pelaksanaan remediasi						X						1
	Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup						X						1
		Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup						X						1
		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat											X	1
	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK		X			X		X	X	X	X	X	7
		Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	X				X		X	X	X		X	6
Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah								X	X	X	X	X	5	

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	GRK; IKL	GRK; IKL	GRK	GRK	GRK; IKA	GRK; IKL; IKU	GRK; IKA; IKL	GRK; IKL	IKA	GRK; IKA	GRK; IKU	JML
			1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*	9*	10*	11*	
		Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/ kota		X			X	X		X				4
		Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	X						X		X		X	4
		Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut				X	X	X						3
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim						X		X			X	3
		Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/ kota						X		X			X	3
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut							X	X			X	3
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/ kota							X		X	X		3
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	X	X										2
		Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/ kota						X				X		2
		Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/ kota						X	X					2
		Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan								X				1
		Pemantauan dan Evaluasi KLHS								X				1

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	GRK; IKL	GRK; IKL	GRK	GRK	GRK; IKA	GRK; IKL; IKU	GRK; IKA; IKL	GRK; IKL	IKA	GRK; IKA	GRK; IKU	JML	
			1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*	9*	10*	11*		
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kabupaten/ kota	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang								X				1	
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD											X		1
	Penyusunan Instrumen ekonomi lingkungan hidup	Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam								X	X	X	X		4
		Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam								X	X	X	X		4
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten/ kota	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH kabupaten/ kota										X	X	X	3
		Penetapan RPPLH kabupaten/ Kota								X		X	X		3
		Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/ kota										X	X		2
		Penyusunan RPPLH kabupaten/ Kota										X			1
			3	3	0	1	4	13	13	12	13	12	11	85	

*) Keterangan

1. Kotoran hewan ternak
2. Proses kimia pembakaran sisa hasil pertanian
3. Irigasi dengan penggenangan areal pertanaman padi
4. Penggunaan varietas padi tinggi emisi
5. Penggunaan Pupuk Anorganik dan Pestisida
6. Kebakaran Hutan dan Lahan
7. Deforestasi dan perubahan tutupan lahan
8. Dekomposisi Gambut
9. Pembuangan limbah industri
10. Tempat pembuangan sampah dan praktik pengelolaan limbah
11. Pembakaran bahan bakar fosil

IV. SUB-SUB KEGIATAN PRIORITAS

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian metode, bahwa beberapa hal yang dipertimbangkan dalam menentukan prioritas sub kegiatan dalam mengatasi masing-masing sumber utama GRK dan IKLH adalah konteks dari masing-masing sub kegiatan. Untuk mempermudah proses dalam pembobotan, masing-masing sub kegiatan dikelompokkan menjadi 11 kategori⁵.

Merujuk pada 11 kategori tersebut, secara umumnya prioritas diberikan pada sub kegiatan dengan kategori DATA, selanjutnya PERENCANAAN, KOORDINASI, dan seterusnya. Namun, pola tersebut tidak secara otomatis berlaku pada semua sub kegiatan. Dalam keadaan tertentu, kategori dapat berubah tidak sesuai dengan urutan tersebut.

A. Provinsi

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 7 menunjukkan bahwa sebagian besar sub kegiatan urusan pertanian provinsi berada pada kategori pengawasan, yaitu sebanyak 34 kegiatan dari total 102 kegiatan. Diurutkan berikutnya, adalah sub kegiatan dengan kategori pengelolaan.

Tabel 7. Jumlah Kategori Sub Kegiatan Urusan Pertanian dan Urusan Lingkungan Hidup Provinsi⁶

	Pertanian	LHK		Pertanian	LHK
DATA			PENCEGAHAN		
Data	3	0	Pencegahan	1	0
Data; Jasling	0	0	PENGELOLAAN		
Data; IKLH	0	0	Pengelolaan	29	0
Data; GRK	0	0	PENGAWASAN		
Data; Penindakan	0	0	Pengawasan	34	0
PERENCANAAN			PEMULIHAN		
Perencanaan	2	0	Pemulihan	3	0
KOORDINASI			PENINDAKAN		
Koordinasi	3	0	Penindakan	6	0
Koordinasi; Pemulihan	0	0	PERIZINAN		
Koordinasi; Pencegahan	0	0	Perizinan	2	0
Koordinasi; Pengadaan	0	0	PENGADAAN		
Koordinasi; Pengelolaan	0	0	Pengadaan	0	0
Koordinasi; Penindakan	0	0	Pengadaan; Data	0	0
PENINGKATAN KAPASITAS			Pengadaan; Benih	6	0
Peningkatan Kapasitas	13	0	Pengadaan; Pakan	0	0
			TOTAL	102	0

A.1. Urusan Pertanian

Sub Kegiatan prioritas urusan pertanian provinsi tertinggi berada pada PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN, dengan sub kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan. Detail prioritas sub kegiatan dapat dilihat pada Tabel 8.

⁵ Penjelasan terhadap kategori yang digunakan dapat dilihat pada bagian Penentuan Sub-Sub Kegiatan Prioritas dalam Mengatasi Masalah Utama

⁶ Untuk urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi tidak dapat dilakukan karena tidak maksimalnya peserta dari OPD terkait

Tabel 8. Urutan Prioritas dan Skor Masing-Masing Sub Kegiatan Urusan Pertanian Provinsi

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	$\Sigma(\text{su}/\text{SI})$	$(\Sigma\text{su})/(\Sigma\text{SU})$	X	Y	Z
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1,50	0,18	1,68	1,67	3,35
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	0,53	0,18	0,72	0,77	1,48
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	0,53	0,18	0,72	0,53	1,25
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	0,53	0,18	0,72	0,23	0,95
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	0,50	0,09	0,59	0,33	0,92
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	0,25	0,09	0,34	0,40	0,74
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	0,25	0,09	0,34	0,30	0,64
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	0,20	0,09	0,29	0,33	0,62
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	0,25	0,09	0,34	0,20	0,54
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	0,25	0,09	0,34	0,10	0,44
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	0,20	0,09	0,29	0,13	0,42

B. Kabupaten/ Kota

Pada urusan pertanian di Kabupaten/ Kota tidak jauh berbeda dengan kondisi ditingkat provinsi, dimana dua kategori terbanyak adalah pengawasan dan pengelolaan. Sedangkan untuk urusan lingkungan hidup, dua terbanyak adalah pada kategori pengelolaan dan perencanaan.

Tabel 9. Jumlah Kategori Sub Kegiatan Urusan Pertanian dan Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota

	Pertanian	LH		Pertanian	LH
DATA			PENCEGAHAN		
Data	2	1	Pencegahan	1	1
Data; Jasling	0	2	PENGELOLAAN		
Data; IKLH	0	4	Pengelolaan	35	17
Data; GRK	0	1	PENGAWASAN		
Data; Penindakan	0	2	Pengawasan	34	7
PERENCANAAN			PEMULIHAN		
Perencanaan	3	12	Pemulihan	6	5
KOORDINASI			PENINDAKAN		
Koordinasi; Data; MHA	0	1	Penindakan	3	7
Koordinasi; Pemulihan	0	2	PERIZINAN		
Koordinasi; Pencegahan	0	1	Perizinan	2	6
Koordinasi; Pengadaan	1	1	PENGADAAN		
Koordinasi; Pengelolaan	0	3	Pengadaan	2	4
Koordinasi; Penindakan	0	3	Pengadaan; Data	0	1
PENINGKATAN KAPASITAS			Pengadaan; Benih	11	0
Peningkatan Kapasitas	13	13	Pengadaan; Pakan	1	0

			TOTAL	114	94
--	--	--	--------------	-----	----

B.1. Urusan Pertanian

Dengan mempertimbangkan banyak faktor sebagaimana yang telah disampaikan pada bagian **Penentuan Sub-Sub Kegiatan Prioritas dalam Mengatasi Masalah Utama**, maka sub kegiatan prioritas yang dianggap mampu mengatasi sumber-sumber utama pada GRK dan IKLH tersaji pada Tabel 10 berikut

Tabel 10. Urutan Prioritas dan Skor Masing-Masing Sub Kegiatan Urusan Pertanian Kabupaten/ Kota

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	$\Sigma(\text{su}/\text{SI})$	$\frac{(\Sigma\text{su})}{(\Sigma\text{SU})}$	X	Y	Z
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	1,39	0,36	1,75	1,43	3,18
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	0,61	0,36	0,98	0,87	1,84
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	0,61	0,36	0,98	0,72	1,69
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	0,63	0,36	0,99	0,40	1,39
Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	0,42	0,27	0,69	0,52	1,21
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	0,56	0,36	0,93	0,19	1,11
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	0,40	0,27	0,68	0,22	0,89
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	0,40	0,27	0,68	0,17	0,84
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	0,25	0,09	0,34	0,40	0,74
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	0,24	0,18	0,42	0,26	0,68
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten / Kota	0,31	0,27	0,59	0,09	0,68
Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	0,25	0,09	0,34	0,30	0,64
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten / Kota	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	0,25	0,09	0,34	0,30	0,64
Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten / Kota	0,17	0,18	0,35	0,23	0,58
Pengembangan Prasarana Pertanian	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten / Kota	0,17	0,18	0,35	0,22	0,57

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	$\Sigma(su/SI)$	$(\Sigma su)/(\Sigma SI)$	X	Y	Z
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	0,20	0,09	0,29	0,27	0,56
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	0,25	0,09	0,34	0,20	0,54
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	0,25	0,09	0,34	0,20	0,54
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	0,17	0,18	0,35	0,19	0,54
Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	0,20	0,09	0,29	0,20	0,49
Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum	Pengelolaan Lahan Pengembalaan Umum	0,17	0,18	0,35	0,11	0,46
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	0,13	0,09	0,22	0,24	0,45
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten / Kota	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	0,25	0,09	0,34	0,10	0,44
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek	0,13	0,09	0,22	0,21	0,43
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	0,20	0,09	0,29	0,13	0,42
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	0,11	0,09	0,20	0,20	0,40
Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	0,20	0,09	0,29	0,07	0,36
Pengembangan Prasarana Pertanian	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	0,09	0,09	0,18	0,17	0,35
Pengembangan Prasarana Pertanian	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	0,09	0,09	0,18	0,15	0,33
Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum	Identifikasi dan Penetapan Lahan Pengembalaan Umum	0,09	0,09	0,18	0,11	0,29
Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	0,17	0,09	0,26	0,00	0,26
Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	0,17	0,09	0,26	0,00	0,26
Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	0,17	0,09	0,26	0,00	0,26
Pembangunan Prasarana Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	0,17	0,09	0,26	0,00	0,26
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	0,08	0,09	0,17	0,08	0,24
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	0,08	0,09	0,17	0,07	0,23

B.2. Urusan Lingkungan Hidup

Jika pada urusan pertanian cenderung memprioritaskan pada penguatan pengawasan, sedangkan pada urusan lingkungan hidup lebih pada pencegahan. Sub kegiatan prioritas pada urusan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut;

Tabel 11. Urutan Prioritas dan Skor Masing-Masing Sub Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	$\Sigma(\text{su}/\text{SI})$	$(\Sigma\text{su})/(\Sigma\text{SU})$	X	Y	Z
Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	1,33	0,27	1,60	1,53	3,13
Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	0,99	0,64	1,63	0,71	2,34
Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	0,67	0,18	0,85	1,39	2,24
Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/ kota	0,74	0,36	1,11	0,91	2,02
Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	0,91	0,55	1,46	0,31	1,77
Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	0,58	0,36	0,94	0,26	1,20
Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	0,41	0,45	0,87	0,30	1,16
Penyusunan Instrumen ekonomi lingkungan hidup	Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam	0,32	0,36	0,68	0,21	0,89
Penyusunan Instrumen ekonomi lingkungan hidup	Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam	0,32	0,36	0,68	0,21	0,89
Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	0,25	0,27	0,52	0,30	0,82
Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	0,25	0,27	0,52	0,21	0,73
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten/ kota	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH kabupaten/ kota	0,25	0,27	0,52	0,18	0,71
Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	0,24	0,27	0,51	0,15	0,66
Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/ kota	0,25	0,27	0,52	0,13	0,66
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten/ kota	Penetapan RPPLH kabupaten/ Kota	0,24	0,27	0,51	0,14	0,65
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten/ kota	Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/ kota	0,16	0,18	0,34	0,09	0,43
Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/ kota	0,16	0,18	0,34	0,09	0,43
Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/ kota dan peraturan	0,15	0,18	0,34	0,07	0,40

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	$\Sigma(\text{su}/\text{SI})$	$(\Sigma\text{su})/(\Sigma\text{SU})$	X	Y	Z
	perundangan di bidang lingkungan hidup					
Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/ kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	0,15	0,18	0,34	0,07	0,40
Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/ kota	0,15	0,18	0,34	0,05	0,39
Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	0,09	0,09	0,18	0,16	0,35
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kabupaten/ kota	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHSRPJPD/RPJMD	0,08	0,09	0,17	0,16	0,34
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kabupaten/ kota	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	0,08	0,09	0,17	0,16	0,34
Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	0,08	0,09	0,17	0,15	0,32
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kabupaten/ kota	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	0,08	0,09	0,17	0,13	0,31
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / Kota	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota	0,09	0,09	0,18	0,05	0,24
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten/ kota	Penyusunan RPPLH kabupaten/ Kota	0,08	0,09	0,17	0,06	0,23
Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	0,08	0,09	0,17	0,06	0,22
Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	0,08	0,09	0,17	0,04	0,21
Pengelolaan Sampah	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/ kota	0,08	0,09	0,17	0,03	0,21
Pengelolaan Sampah	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	0,08	0,09	0,17	0,03	0,21
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ Kota	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan / atau Izin PPLH	0,09	0,09	0,18	0,02	0,20
Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi	0,08	0,09	0,17	0,03	0,20
Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	0,08	0,09	0,17	0,03	0,20
Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	0,08	0,09	0,17	0,03	0,20
Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Pelaksanaan Restorasi	0,08	0,09	0,17	0,02	0,19

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	$\Sigma(\text{su}/\text{SI})$	$(\Sigma\text{su})/(\Sigma\text{SU})$	X	Y	Z
Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/ kota yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota	0,08	0,09	0,17	0,02	0,19
Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Pelaksanaan remediasi	0,08	0,09	0,17	0,02	0,18
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kabupaten/ kota	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten/ kota	Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / Kota	Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNSLHK Daerah	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah kabupaten/ kota	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07
Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah kabupaten/ kota	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat / komunitas / kelompok masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ Kota	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati kabupaten/ kota	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah kabupaten/ kota	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah kabupaten/ kota	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/ kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan / atau Penimbunan	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah kabupaten/ kota	Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan / Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	$\Sigma(\text{su}/\text{SI})$	$(\Sigma\text{su})/(\Sigma\text{SU})$	X	Y	Z
Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH					
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ Kota	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/ kota	Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/ kota	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati kabupaten/ kota	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati kabupaten/ kota	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
Pengelolaan Sampah	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
Pengelolaan Sampah	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ Kota	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / Kota	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / Kota	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat kabupaten/ kota	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/ kota	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/ kota atau TPA/TPSTRegional	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pengangkutan	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / Kota	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/ kota	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
Pengelolaan Sampah	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
Pengelolaan Sampah	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
Pengelolaan Sampah	Pengurangan sampah melalui daur ulang sampah	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	$\Sigma(\text{su}/\text{SI})$	$(\Sigma\text{su})/(\Sigma\text{SU})$	X	Y	Z
Pengelolaan Sampah	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/ kota	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Pelaksanaan rehabilitasi	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Pengelolaan Sampah	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati kabupaten/ kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Pengelolaan Sampah	Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/ atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01

V. MEMBANGUN SINERGITAS SUB KEGIATAN PROVINSI-KABUPATEN/KOTA

Sub-sub kegiatan antara kabupaten/kota dan provinsi tidak sama dalam memprioritaskan sub-sub kegiatan yang dianggap dapat mempengaruhi sumber utama GRK dan IKLH. Untuk memperlancar capaian target provinsi, tentunya diperlukan adanya relasi kuat dengan sub kegiatan yang ada di Kabupaten/ Kota, dan juga berlaku sebaliknya. Dalam membangun relasi antara sub-sub kegiatan provinsi dan kabupaten/ kota dilakukan dengan mengidentifikasi sub-sub kegiatan prioritas provinsi dan kabupaten/ kota, serta sub kegiatan yang dibutuhkan untuk diselenggarakan oleh pemerintah daerah level provinsi dan/ atau kabupaten kota.

A. Urusan Pertanian

Untuk memastikan penyelenggaraan urusan pertanian ditingkat Provinsi mendapat dukungan kuat dari Kabupaten/ Kota, maka diperlukan sub kegiatan yang setidaknya dapat mendukung urusan provinsi (lihat Tabel 12 kolom 3). Dan juga sebaliknya, keberhasilan sub kegiatan tingkat kabupaten/ kota juga membutuhkan dukungan dari provinsi melalui sub-sub kegiatan yang diselenggarakan (lihat Tabel 12 kolom 2).

Tabel 12. Bridging Sub Kegiatan Urusan Pertanian Provinsi-Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Prioritas Provinsi 1	Bridging Provinsi ⁷ 2	Bridging Kabupaten ⁸ 3	Sub Kegiatan Prioritas Kab/ Kota 4
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	<i>Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian</i>	<i>Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan</i>	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	<i>Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan</i>	<i>Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya</i>	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	<i>Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian</i>	<i>Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi</i>	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian
Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	<i>Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota</i>	<i>Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan</i>	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	<i>Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian</i>	<i>Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan</i>	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	<i>Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian</i>	<i>Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih</i>	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	<i>Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian</i>	<i>Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang</i>	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi

⁷ Sub Kegiatan Provinsi untuk Menjembatani Kelancaran Capaian Sub Kegiatan Prioritas Kabupaten/ Kota

⁸ Sub Kegiatan Kabupaten untuk Menjembatani Kelancaran Capaian Sub Kegiatan Prioritas Provinsi

Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya</i>	<i>Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan</i>	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	<i>Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan</i>	<i>Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak</i>	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten / Kota
Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	<i>Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan</i>	<i>Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/Tanaman Skala Kecil</i>	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan

B. Urusan Lingkungan Hidup

Dalam urusan lingkungan hidup, tidak teridentifikasi sub-sub kegiatan prioritas urusan ditingkat provinsi. Dalam hal ini, relasi sub kegiatan prioritas mengacu pada Kabupaten/ Kota. Diharapkan OPD terkait urusan Lingkungan Hidup dapat memprioritaskan sub-sub kegiatan yang memperlancar capaian sub-sub kegiatan di Kabupaten (sebagaimana ditampilkan pada Tabel 13 kolom 2).

Tabel 13. Bridging Sub Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Provinsi-Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Prioritas Provinsi	Bridging Provinsi ⁹	Bridging Kabupaten ¹⁰	Sub Kegiatan Prioritas Kab/ Kota
1	2	3	4
	<i>Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut</i>		Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
	<i>Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK</i>		Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</i>		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
	<i>Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi</i>		Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/ kota
	<i>Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan</i>		Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan
	<i>Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</i>		Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
	<i>Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah</i>		Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
	<i>Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam</i>		Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam

⁹ Sub Kegiatan Provinsi untuk Menjembatani Kelancaran Capaian Sub Kegiatan Prioritas Kabupaten/ Kota

¹⁰ Sub Kegiatan Kabupaten untuk Menjembatani Kelancaran Capaian Sub Kegiatan Prioritas Provinsi

Sub Kegiatan Prioritas Provinsi	Bridging Provinsi⁹	Bridging Kabupaten¹⁰	Sub Kegiatan Prioritas Kab/ Kota
1	2	3	4
	<i>Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam</i>		Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam
	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</i>		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari identifikasi sumber-sumber masalah yang dapat mempengaruhi IKLH dan emisi GRK. Maka dilakukan inventarisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada urusan-urusan yang mempengaruhi IKLH dan GRK yang bersifat strategis dan prioritas dapat dilakukan. Beberapa kesimpulan umum dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pada urusan bidang pertanian terdapat 3 (tiga) OPD Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki program, kegiatan sub kegiatan untuk urusan bidang pertanian yang mempengaruhi IKLH dan GRK, yakni Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, dan Dinas Ketahanan Pangan. Sedangkan OPD Kabupaten memiliki nomenklatur yang berbeda-beda kendati kewenangan yang sama, seperti Dinas Pertanian dan Perkebunan di Kabupaten Sintang, Dinas Perkebunan dan Peternakan di Kabupaten Sanggau, Dinas Perkebunan dan Peternakan di Kabupaten Kubu Raya, dan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan di Kabupaten Ketapang.;
2. Jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan kewenangan provinsi pada urusan bidang pertanian ini meliputi 6 (enam) program, 21 (dua puluh satu) kegiatan dan 102 (seratus dua) sub kegiatan. Sedangkan Jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan kewenangan kabupaten urusan bidang pertanian melingkupi (enam) program, 20 (dua puluh) kegiatan dan 114 (seratus empat belas) sub kegiatan;
3. Pada urusan lingkungan hidup dan kehutanan terdapat 1 (satu) OPD di tingkat provinsi, yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta kewenangannya terhadap 17 UPT KPH di 14 kabupaten/kota. Sedangkan OPD di tingkat kabupaten terdapat 1 (satu) OPD, yakni Dinas Lingkungan Hidup;
4. Jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan kewenangan provinsi pada urusan bidang lingkungan hidup ini meliputi 10 (sepuluh) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 81 (delapan puluh satu) sub kegiatan. Jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan kewenangan provinsi pada urusan bidang kehutanan ini meliputi 6 (enam) program, 26 (dua puluh enam) kegiatan dan 83 (delapan puluh tiga) sub kegiatan. Sedangkan jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan kewenangan kabupaten urusan bidang lingkungan hidup melingkupi 10 (sepuluh) program, 19 (sembilan belas) kegiatan dan 94 (sembilan puluh empat) sub kegiatan. Terkait jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan kewenangan kabupaten urusan bidang kehutanan melingkupi 2 (dua) program, 3 (tiga) kegiatan dan 10 (sepuluh) sub kegiatan;
5. Pada urusan bidang energi dan sumber daya mineral terdapat 1 (satu) OPD di tingkat provinsi, yakni Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral. Sedangkan di tingkat kabupaten tidak ada nomenklatur pada OPD terkait yang menangani urusan bidang energi dan sumber daya mineral secara langsung.
6. Jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan kewenangan provinsi pada urusan bidang energi dan sumber daya mineral ini meliputi 5 (lima) program, 79 (tujuh puluh sembilan) kegiatan dan 230 (dua ratus tiga puluh) sub kegiatan. Sedangkan urusan bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan kewenangan kabupaten kendati tak memiliki OPD yang menangani namun memiliki relasi terhadap urusan ini, jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan kewenangan kabupaten pada urusan bidang energi dan sumber daya mineral ini meliputi 2 (dua) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan.

VII. PORTOFOLIO PENULIS

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa W, Nursyamsi D. 2017a. EMISI GAS RUMAH KACA DARI PENGELOLAAN LAHAN GAMBUT. Jakarta: Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa.
- Annisa W, Nursyamsi D. 2017b. Potensi Emisi Karbon di Lahan Gambut Tropis. Jakarta: Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa.
- Detikcom. 2021. Pencemaran Air: Pengertian, Penyebab dan Dampaknya bagi Lingkungan. <https://www.detik.com/> [Internet]. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5693376/pencemaran-air-pengertian-penyebab-dan-dampaknya-bagi-lingkungan>
- Firmansyah R. 2022. Pembangunan Rendah Karbon Sektor Pertanian: Konseptual, Implementasi dan Strategi ke depan. Low Carbon Dev Indones [Internet]. <https://lcdi-indonesia.id/2022/10/05/pembangunan-rendah-karbon-sektor-pertanian-konseptual-implementasi-dan-strategi-ke-depan/>
- Idrus SW Al. 2014. ANALISIS PENCEMARAN AIR MENGGUNAKAN METODE SEDERHANA PADA SUNGAI JANGKUK, KEKALIK DAN SEKARBELA KOTA MATARAM. Paedagoria. 10(2):8–14.
- K I, Alam S, Rahayu A. 2021. DAMPAK LIMBAH PABRIK KELAPA SAWIT TERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI KECAMATAN SARUDU KABUPATEN PASANGKAYU. J Pegguruang Conf Ser. 3(2):490–493. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.35329/jp.v3i2.2420>
- Koaksi Indonesia. Apa Itu Gas Rumah Kaca? Penyebab dan Mitigasinya. Coaction Indones [Internet]. <https://coaction.id/apa-itu-gas-rumah-kaca-penyebab-dan-mitigasinya/>
- Krisnawati H, Adinugroho WC, Imanuddin R, Hutabarat S. 2015. Pendugaan Emisi Gas Rumah Kaca Tahunan dari Hutan dan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah. [place unknown]: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Kurniarahma L, Laut LT, Prasetyanto PK. 2020. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EMISI CO₂ DI INDONESIA. Din Dir J Econ. 2(2):368–385.
- Mambu SM. 2012. Pendugaan Emisi Metana pada Sistem Pengelolaan Tanaman Padi di Kabupaten Minahasa. J Bioslogos. 2(1):37–44.
- Pratiwi SSD. 2021. ANALISIS DAMPAK SUMBER AIR SUNGAI AKIBAT PENCEMARAN PABRIK GULA DAN PABRIK PEMBUATAN SOSIS. J Res Educ Chem. 3(2):122–142. [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jrec.2021.vol3\(2\).7774](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jrec.2021.vol3(2).7774)
- Wahyudi J. 2019. EMISI GAS RUMAH KACA (GRK) DARI PEMBAKARAN TERBUKA SAMPAH RUMAH TANGGA MENGGUNAKAN MODEL IPCC. J Litbang. XV(1):65–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.33658/jl.v15i1.132>
- Wihardjaka A, Pramono A, Sutriadi MT. 2020. Peningkatan Produktivitas Padi Sawah Tadah Hujan Melalui Penerapan Teknologi Adaptif Dampak Perubahan Iklim. J Sumberd Lahan. 14(1):25–36.

LAMPIRAN BUDGET TAGGING GRK DAN IKLH

A. Urusan Lingkungan Hidup Provinsi

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN	K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP													
2	11	02	1,01	0002	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Tersedianya Dokumen Telaahan kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	GRK	IKA		IKU	
2	11	02	1,01	0003	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH	Tersedianya dokumen rencana tematik yang merupakan bagian arahan RPPLH	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst yang ditetapkan					
2	11	02	1,01	0004	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Penyusunan RPPLH Provinsi	RPPLH Provinsi yang disusun	jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi		IKA			
2	11	02	1,01	0005	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Penetapan RPPLH Provinsi	RPPLH Provinsi yang ditetapkan	Dokumen RPPLH Provinsi yang ditetapkan	GRK	IKA	IKL		
2	11	02	1,01	0006	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi	RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	GRK	IKA			
2	11	02	1,02	0002	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD / RPJMD Provinsi yang Disusun	GRK	IKA			
2	11	02	1,02	0005	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota	Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan	GRK	IKA			
2	11	02	1,02	0006	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	GRK		IKL		
2	11	02	1,02	0007	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	GRK		IKL		

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN	K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas
2	11	02	1,02	0008	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Tersusunnya KLHS untuk KRP Lainnya yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	GRK		IKL	IKU	
2	11	02	3,01	0003	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Pembinaan, penilaian, evaluasi terhadap RPPLH kabupaten/kota	Tersedianya dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan RPPLH kabupaten / kota	Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan RPPLH kabupaten/kota	GRK	IKA	IKL		
2	11	02	3,02	0001	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Pembinaan, penilaian, evaluasi terhadap KLHS kabupaten/kota	Tersedianya dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten / kota	Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota	GRK	IKA			
2	11	02	3,03	0001	Penyusunan Instrumen ekonomi lingkungan hidup	Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam	Terlaksananya analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam	Jumlah dokumen analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam yang dilaksanakan	GRK	IKA	IKL		
2	11	02	4,01	0003	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Pembinaan, penilaian, evaluasi terhadap RPPLH kabupaten/kota	Tersedianya dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan RPPLH kabupaten / kota	Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan RPPLH kabupaten/kota	GRK	IKA	IKL		
2	11	02	4,02	0001	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Pembinaan, penilaian, evaluasi terhadap KLHS kabupaten/kota	Tersedianya dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten / kota	Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota	GRK	IKA			
2	11	02	4,03	0001	Penyusunan Instrumen ekonomi lingkungan hidup	Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam	Terlaksananya analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam	Jumlah dokumen analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam yang dilaksanakan	GRK	IKA	IKL		
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP													
2	11	03	1,01	0001	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	GRK	IKA	IKL	IKU	

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN	K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas
2	11	03	1,01	0002	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	GRK		IKL	IKU	
2	11	03	1,01	0004	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	GRK	IKA	IKL	IKU	
2	11	03	1,01	0005	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	Terlaksananya upaya mitigasi perubahan iklim di tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	GRK	IKA	IKL	IKU	
2	11	03	1,01	0006	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	GRK	IKA	IKL		
2	11	03	1,01	0007	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi	Terlaksananya upaya adaptasi perubahan iklim di tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	GRK	IKA	IKL	IKU	
2	11	03	1,01	0008	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Laporan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	GRK	IKA	IKL	IKU	
2	11	03	1,01	0009	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	GRK	IKA	IKL	IKU	

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN	K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas
2	11	03	1,01	0010	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	GRK		IKL		
2	11	03	1,01	0011	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Tersedianya dokumen hasil inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	GRK	IKA	IKL	IKU	
2	11	03	1,01	0012	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	GRK	IKA	IKL	IKU	
2	11	03	1,01	0013	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Tersedianya peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	GRK	IKA	IKL	IKU	
2	11	03	1,01	0014	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Beroperasi dan berfungsinya alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan	GRK	IKA	IKL	IKU	
2	11	03	1,01	0015	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	GRK	IKA	IKL		
2	11	03	1,02	0001	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	GRK			IKU	
2	11	03	1,02	0002	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Area Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	GRK		IKL	IKU	

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN	K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas
2	11	03	1,02	0003	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	GRK		IKL	IKU	
2	11	03	1,03	0001	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kewenangan Pemerintah dan/ atau Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan					
2	11	03	1,03	0006	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	GRK		IKL	IKU	
2	11	03	1,03	0007	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pelaksanaan rehabilitasi	kegiatan rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi					
2	11	03	1,03	0008	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pelaksanaan Restorasi	kegiatan restorasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan restorasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi	GRK		IKL	IKU	
2	11	03	1,03	0009	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan					
2	11	03	1,03	0010	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota	kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten / kota	GRK	IKA			

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN	K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas
2	11	03	1,03	0011	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi	pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi	GRK		IKL	IKU	
2	11	03	1,03	0012	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi	kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	GRK		IKL	IKU	
2	11	03	1,03	0013	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pelaksanaan remediasi	kegiatan remediasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan remediasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi	GRK		IKL	IKU	
2	11	03	3,04	0001	Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota	Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota	Terlaksananya Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota	Jumlah laporan pembinaan, penilaian, dan evaluasi terhadap pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota					
2	11	03	4,04	0001	Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota	Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota	Terlaksananya Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota	Jumlah laporan pembinaan, penilaian, dan evaluasi terhadap pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota					
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)													
2	11	04	1,01	0001	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun					

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN	K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas
2	11	04	1,01	0003	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Pengelolaan Kebun Raya	Kebun Raya yang Dikelola	Luas Kebun Raya yang Dikelola lingkup Kewenangan Provinsi					
2	11	04	1,01	0004	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi					
2	11	04	1,01	0006	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Meningkatnya jumlah orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati					
2	11	04	1,01	0007	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola					
2	11	04	1,01	0008	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	Unit Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi					
2	11	04	1,01	0009	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi					
2	11	04	3,01	0009	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati lintas Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati lintas Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penilaian dan evaluasi terhadap pengelolaan keanekaragaman hayati lintas kabupaten / Kota					
2	11	04	4,01	0009	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati lintas Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati lintas Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penilaian dan evaluasi terhadap pengelolaan keanekaragaman hayati lintas kabupaten / Kota					
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)													

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN	K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas
2	11	05	1,01	0001	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		IKA			
2	11	05	1,01	0002	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan / atau Penimbunan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya		IKA			
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)													
2	11	06	1,01	0001	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	GRK			IKU	
2	11	06	1,01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya					

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN	K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas
2	11	06	1,01	0006	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Peretujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Peretujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi					
2	11	06	1,01	0007	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang dibentuk	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD					
2	11	06	3,01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak menaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	Terlaksananya Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak menaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	Jumlah dokumen analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak menaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan	GRK	IKA	IKL		
2	11	06	3,02	0001	Pembinaan dan Evaluasi terhadap Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Pembinaan dan Evaluasi terhadap Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi terhadap Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Pembinaan dan Evaluasi terhadap Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan , persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		IKA			

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN	K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas
2	11	06	3,02	0002	Pembinaan dan Evaluasi terhadap Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja tim uji kelayakan lingkungan hidup tingkat kabupaten / kota bersama lembaga uji kelayakan	Terlaksananya pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja tim uji kelayakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/ kota bersama lembaga uji kelayakan	Jumlah laporan Pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja tim uji kelayakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/ kota bersama lembaga uji kelayakan	GRK	IKA	IKL	IKU	
2	11	06	4,01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak menaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	Terlaksananya Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak menaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	Jumlah dokumen analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak menaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan	GRK	IKA	IKL		
2	11	06	4,02	0001	Pembinaan dan Evaluasi terhadap Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Pembinaan dan Evaluasi terhadap Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi terhadap Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Pembinaan dan Evaluasi terhadap Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan , persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		IKA			
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH													
2	11	07	1,01	0001	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	GRK	IKA	IKL		

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN	K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas
2	11	07	1,02	0001	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan					
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT													
2	11	08	1,01	0002	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan					
2	11	08	1,01	0003	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya jumlah penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	GRK	IKA			
2	11	08	1,01	0004	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat					
2	11	08	1,01	0005	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat / komunitas / kelompok masyarakat	Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat / komunitas / kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala provinsi yang terdaftar di Provinsi yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal / lembaga masyarakat / komunitas / kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH					

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN	K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT													
2	11	09	1,01	0001	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH					
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP													
2	11	10	1,01	0003	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi					
2	11	10	1,01	0004	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah	PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya					
2	11	10	1,01	0005	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Diselesaikannya sengketa lingkungan hidup yang ditangani baik Melalui Pengadilan ataupun di Luar Pengadilan yang merupakan kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	GRK			IKU	
2	11	10	1,01	0006	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	Diselesaikannya kasus tindak pidana lingkungan hidup yang merupakan kewenangan Provinsi sampai P-21	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi					
2	11	10	1,01	0007	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Penanganan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani					
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN													

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN	K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas
2	11	11	1,01	0002	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Terlaksananya Pemrosesan Akhir Sampah dan residu di TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional	GRK	IKA		IKU	
2	11	11	1,01	0003	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	GRK	IKA		IKU	
2	11	11	1,01	0005	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan					
2	11	11	1,01	0006	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	Jumlah Volume Sampah dari kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan	GRK	IKA			
2	11	11	1,01	0007	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia					
2	11	11	1,01	0008	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	GRK	IKA			
2	11	11	1,01	0009	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	GRK	IKA			
2	11	11	1,01	0010	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	Tersusunnya laporan pemantauan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional					
2	11	11	1,01	0011	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Pengelolaan sampah Regional	Terlaksananya pengelolaan sampah regional	Jumlah sampah regional yang dikelola					
2	11	11	1,01	0012	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional					

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN	K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas
2	11	11	1,01	0013	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	Sampah Pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani	Jumlah sampah pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani					
2	11	11	1,01	0014	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten / kota	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/ kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten / kota					

B. Urusan Pertanian Provinsi

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN	K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN													
3	27	02	1,01	0001	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Terawasinya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	GRK	IKA			1,25
3	27	02	1,01	0002	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	GRK	IKA			1,48
3	27	02	1,01	0003	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan					0,00
3	27	02	1,01	0004	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	GRK	IKA	IKL		0,95
3	27	02	1,01	0005	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan					0,00
3	27	02	1,01	0006	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	GRK	IKA			0,42
3	27	02	1,01	0007	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura					0,00
3	27	02	1,01	0008	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan					0,00
3	27	02	1,02	0001	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Terkelolanya Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	GRK				0,54

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK IKA IKL IKU	Bobot Prioritas	
3	27	02	1,02	0005	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harsa.	GRK	0,44
3	27	02	1,02	0006	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Tersedianya benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan		0,00
3	27	02	1,02	0007	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Tersedianya benih bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	GRK	0,64
3	27	02	1,02	0008	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Tersedianya benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh		0,00
3	27	02	1,02	0009	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek	Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk Setek yang diperbanyak	GRK	0,00
3	27	02	1,02	0010	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Tersedianya benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek		0,00
3	27	02	1,02	0011	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Tersedianya benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji		0,00
3	27	02	1,02	0012	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Tersedianya benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang		0,00

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN	K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas
3	27	02	1,02	0013	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Perbanyakkan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	GRK				0,74
3	27	02	1,02	0014	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Perbanyakkan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	Tersedianya benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak					0,00
3	27	02	1,03	0002	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Terlaksananya Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai					0,00
3	27	02	1,03	0003	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Terlaksananya Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	GRK	IKA	IKL	IKU	0,00
3	27	02	1,03	0004	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Terlaksananya Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme					0,00

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK IKA IKL IKU	Bobot Prioritas
3	27	02	1,03	0005	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Penilaian rumpun SDG Hewan	Terlaksananya penilaian rumpun SDG Hewan	Jumlah rumpun SDG hewan yang dinilai	0,00
3	27	02	1,03	0006	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Penilaian galur SDG Hewan	Terlaksananya penilaian galur SDG Hewan	Jumlah galur SDG hewan yang dinilai	0,00
3	27	02	1,04	0001	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	0,00
3	27	02	1,04	0004	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	0,00

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN	K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK IKA IKL IKU	Bobot Prioritas
3	27	02	1,04	0005	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner	Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas		0,00
3	27	02	1,05	0003	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Terawasinya Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat.		0,00
3	27	02	1,05	0004	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih / Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Terkendalnya penyediaan dan produksi benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi		0,00
3	27	02	1,05	0005	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Terjaminnya peredaran benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar		0,00

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas
3	27	02	1,06	0001	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan					0,00
3	27	02	1,06	0002	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Terlaksananya Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan					0,00
3	27	02	1,07	0002	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	GRK		IKL	0,00
3	27	02	1,07	0003	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Tersedianya benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain				0,00
3	27	02	1,07	0004	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain				0,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN												
3	27	03	1,01	0001	Penataan Prasarana Pertanian	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Tersusunnya Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	GRK	IKA	IKL	0,00
3	27	03	1,01	0003	Penataan Prasarana Pertanian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani				0,00

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas	
3	27	03	1,01	0004	Penataan Prasarana Pertanian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	GRK				0,00
3	27	03	1,01	0007	Penataan Prasarana Pertanian	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Terbangun dan Terpeliharanya Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara					0,00
3	27	03	1,01	0009	Penataan Prasarana Pertanian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	GRK	IKA			0,00
3	27	03	1,01	0010	Penataan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Terbangun, Terehabilitasi, dan Terpeliharanya Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi					0,00
3	27	03	1,01	0011	Penataan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan					0,00
3	27	03	1,01	0012	Penataan Prasarana Pertanian	Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Terbangun, terehabilitasi, terpelihara, dan Terselenggaranya Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan, dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet					0,00
3	27	03	1,01	0013	Penataan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	GRK	IKA	IKL	IKU	0,00
3	27	03	1,01	0014	Penataan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan					0,00
3	27	03	1,01	0015	Penataan Prasarana Pertanian	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di tingkat provinsi	Ditetapkannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	GRK	IKA	IKL	IKU	0,00
3	27	03	1,01	0016	Penataan Prasarana Pertanian	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	GRK	IKA	IKL		0,00

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas		
3	27	03	1,01	0017	Penataan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Perkebunan					0,00		
3	27	03	1,01	0018	Penataan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi	Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola di tingkat Provinsi	GRK	IKA	IKL	IKU	0,00
3	27	03	1,01	0019	Penataan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Peternakan					0,00		
3	27	03	1,01	0020	Penataan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan					0,00	
3	27	03	1,01	0021	Penataan Prasarana Pertanian	Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri / Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	Terbangunnya, terehabilitasi yang terpeliharanya Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri / Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan					0,00	
3	27	03	1,01	0022	Penataan Prasarana Pertanian	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Benih atau Balai Benih Ternak Tingkat Provinsi (BIBD Provinsi)	Terbangun dan terpeliharanya laboratorium benih atau balai benih ternak	Jumlah laboratorium benih ternak yang dibangun dan dipelihara					0,00	
3	27	03	1,01	0023	Penataan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	GRK		IKL		0,00	
3	27	03	1,01	0024	Penataan Prasarana Pertanian	Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan terselenggaranya Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan					0,00	
3	27	03	1,01	0025	Penataan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan					0,00	

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN	K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK IKA IKL IKU	Bobot Prioritas
3	27	03	1,02	0001	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Terlaksananya Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan		0,00
3	27	03	1,02	0002	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Terawasinya Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak		0,00
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKA! VETERINER										
3	27	04	1,01	0003	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Tertanggulangnya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali		0,00

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN	K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas
3	27	04	1,01	0004	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan					0,00
3	27	04	1,01	0005	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Terlayannya Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan					0,00
3	27	04	1,01	0006	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis	Terlaksananya manajemen risiko zoonosis sesuai dengan status zoonosis daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis					0,00

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN	K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas
3	27	04	1,01	0007	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					0,00
3	27	04	1,01	0008	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Terlaksananya Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	GRK		IKL		0,00
3	27	04	1,01	0009	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Terbentuknya kader zoonosis	Jumlah kader zoonosis					0,00
3	27	04	1,02	0004	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Terawasi dan terperiksanya kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM					0,00

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK IKA IKL IKU	Bobot Prioritas
3	27	04	1,02	0005	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Terkendalinya Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	0,00
3	27	04	1,02	0006	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	0,00
3	27	04	1,02	0007	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan / atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/ atau pengeluaran HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	0,00
3	27	04	1,03	0001	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Terpenuhinya Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	0,00
3	27	04	1,03	0002	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Terbinanya Unit Usaha Produk Hewan Dalam Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	0,00

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN	K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas
3	27	04	1,03	0003	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner					0,00
3	27	04	1,03	0004	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan	Terlaksananya pendampingan penerapan teknis kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan		IKA			0,00
3	27	04	1,03	0005	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Terbinanya unit usaha produk hewan dal am penerapan persyaratan higiene sanitasi	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi					0,00
3	27	04	1,03	0006	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik		IKA			0,00
3	27	04	1,03	0007	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan					0,00

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN	K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas
3	27	04	1,03	0008	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi Persyaratan registrasi Produk hewan					0,00
3	27	04	1,04	0003	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Terkelolanya Penerbitan Rekomendasi Pemasukan, Rekomendasi Pengeluaran, Sertifikat Veteriner dan SKKH/SKPH untuk HPM	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM					0,00
3	27	04	1,04	0004	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi					0,00
3	27	04	1,05	0002	Kesejahteraan Hewan	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Tertanganinya Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani					0,00
3	27	04	1,05	0003	Kesejahteraan Hewan	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Terkelolanya penerbitan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)					0,00
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN													
3	27	05	1,01	0001	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	GRK	IKA			0,62
3	27	05	1,01	0002	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	GRK	IKA	IKL	IKU	0,92
3	27	05	1,01	0003	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	GRK	IKA	IKL	IKU	3,35

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas	
3	27	05	1,01	0005	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Tertanggulangnya pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	GRK	IKL	IKU	0,00	
3	27	05	1,01	0006	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan	Terlaksananya Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan				0,00	
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN													
3	27	06	1,01	0001	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Tersusunnya Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	GRK	IKA	IKL	IKU	0,00
3	27	06	1,01	0002	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten / Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten / Kota	GRK	IKA	IKL	IKU	0,00
3	27	06	1,01	0004	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikasi unit usaha Pembibitan/Budidaya Ternak	terlaksananya sertifikasi penerapan cara pembibitan/budidaya ternak yang baik di unit usaha pembibitan/ budidaya ternak	Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yangbaik					0,00
3	27	06	1,01	0005	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	T erbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	GRK	IKA	IKL	IKU	0,00

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK IKA IKL IKU	Bobot Prioritas
3	27	06	1,02	0001	Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Memenuhi Komitmen	0,00
3	27	06	1,02	0002	Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi	Pengawasan Pelaksanaan Izin Laboratorium	Terawasinya Pelaksanaan Izin Laboratorium	Jumlah Izin Laboratorium yang Diawasi	0,00
3	27	06	1,03	0001	Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin usaha Distributor Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	0,00
3	27	06	1,03	0002	Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Distributor Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Diawasi	0,00
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN									
3	27	07	1,01	0003	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	0,00
3	27	07	1,01	0004	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	T erseedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	0,00

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN	K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas
3	27	07	1,02	0001	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Termanfaatkannya Teknologi Inovasi Pertanian yang Didesiminasikan oleh Penyuluh Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	GRK	IKA	IKL	IKU	0,00
3	27	07	1,02	0002	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan					0,00
3	27	07	1,03	0005	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Terlaksananya pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi					0,00
3	27	07	1,03	0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Terbentuk dan beroperasinya kelembagaan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi					0,00
3	27	07	3,02	0003	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Pengelolaan UPTD Penyuluhan Pertanian di Tingkat Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian di Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian di Tingkat Provinsi					0,00
3	27	07	4,02	0003	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Pengelolaan UPTD Penyuluhan Pertanian di Tingkat Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian di Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian di Tingkat Provinsi					0,00

C. Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN	K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP													
2	11	02	2,01	0002	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten/ kota	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH kabupaten/ kota	Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH kabupaten/ Kota	GRK	IKA		IKU	0,71
2	11	02	2,01	0003	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten/ kota	Penetapan RPPLH kabupaten/ Kota	RPPLH kabupaten/ kota yang ditetapkan	Dokumen RPPLH kabupaten/ kota yang di tetapkan	GRK	IKA	IKL		0,65
2	11	02	2,01	0004	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten/ kota	Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/ kota	RPPLH kabupaten/ kota yang dilakukan peninjauan kembali	Dokumen RPPLH kabupaten/ kota yang dilakukan peninjauan kembali	GRK	IKA			0,43
2	11	02	2,01	0005	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten/ kota	Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH	Tersedianya dokumen rencana tematik yang merupakan bagian arahan RPPLH	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst yang ditetapkan					0,10
2	11	02	2,01	0006	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten/ kota	Penyusunan RPPLH kabupaten/ Kota	RPPLH kabupaten/ kota yang disusun	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/ kota yang berisi arahan / muatan RPPLH kabupaten/ kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi		IKA			0,23
2	11	02	2,02	0002	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kabupaten/ kota	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHSRPJPD/RPJMD	Tersusunnya KLHSRPJPD/ RPJMD Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen KLHSRPJPD/RPJMD kabupaten/ kota yang Disusun	GRK	IKA			0,34
2	11	02	2,02	0004	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kabupaten/ kota	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	GRK		IKL		0,31
2	11	02	2,02	0005	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kabupaten/ kota	Penyelenggaraan KLHSRencana Tata Ruang	Tersusunnya KLHSRencana Tata Ruang kabupaten/ kota	Jumlah Dokumen KLHSRencana Tata Ruang kabupaten/ kota yang Disusun	GRK		IKL		0,34

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN	K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas
2	11	02	2,02	0006	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kabupaten/ kota	Penyelenggaraan KLHS untuk KRPyang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Tersusunnya KLHS untuk KRPLainnya yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHSKRPlainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/re siko lingkungan hidup yang disusun	GRK		IKL	IKU	0,11
2	11	02	3,02	0001	Penyusunan Instrumen ekonomi lingkungan hidup	Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam	Terlaksananya analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam	Jumlah dokumen analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam yang dilaksanakan	GRK	IKA	IKL		0,89
2	11	02	4,02	0001	Penyusunan Instrumen ekonomi lingkungan hidup	Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam	Terlaksananya analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam	Jumlah dokumen analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam yang dilaksanakan	GRK	IKA	IKL		0,89
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP													
2	11	03	2,01	0001	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	GRK	IKA	IKL	IKU	0,82
2	11	03	2,01	0002	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	GRK		IKL	IKU	0,73
2	11	03	2,01	0004	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	GRK		IKL		2,24
2	11	03	2,01	0005	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Tersedianya dokumen hasil inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	GRK	IKA	IKL	IKU	2,34

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN	K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas
2	11	03	2,01	0006	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Laporan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	GRK	IKA	IKL	IKU	3,13
2	11	03	2,01	0007	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	GRK	IKA	IKL	IKU	1,20
2	11	03	2,01	0008	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	GRK	IKA	IKL		0,32
2	11	03	2,01	0009	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/ kota	Beroperasi dan berfungsinya alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/ kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/ kota yang dilakukan pemeliharaan	GRK	IKA	IKL	IKU	0,39
2	11	03	2,01	0010	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/ kota	Terlaksananya upaya mitigasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/ kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	GRK	IKA	IKL	IKU	0,66
2	11	03	2,01	0011	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	GRK	IKA	IKL	IKU	1,16
2	11	03	2,01	0012	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	GRK	IKA	IKL	IKU	1,77

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN	K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas
2	11	03	2,01	0013	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/ kota	Tersedianya peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/ kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/ kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	GRK	IKA	IKL	IKU	0,43
2	11	03	2,01	0014	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/ kota	Terlaksananya upaya adaptasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/ kota	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	GRK	IKA	IKL	IKU	2,02
2	11	03	2,01	0015	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	GRK	IKA	IKL		0,66
2	11	03	2,02	0001	Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan	GRK			IKU	0,35
2	11	03	2,02	0002	Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Area Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	GRK		IKL	IKU	0,20
2	11	03	2,02	0003	Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Sumber Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	GRK		IKL	IKU	0,20
2	11	03	2,03	0001	Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/ atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan					0,07

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN	K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas
2	11	03	2,03	0006	Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Pelaksanaan remediasi	kegiatan remediasi di kabupaten/ kota yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/ kota yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota	GRK		IKL	IKU	0,18
2	11	03	2,03	0007	Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/ kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/ kota yang dilaksanakan	GRK		IKL	IKU	0,21
2	11	03	2,03	0008	Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi	kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/ kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/ kota yang dilaksanakan	GRK		IKL	IKU	0,20
2	11	03	2,03	0009	Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Pelaksanaan rehabilitasi	kegiatan rehabilitasi di kabupaten/ kota yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/ kota yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota					0,01
2	11	03	2,03	0010	Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Pelaksanaan Restorasi	kegiatan restorasi di kabupaten/ kota yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/ kota yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota	GRK		IKL	IKU	0,19
2	11	03	2,03	0011	Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/ kota yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota	pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/ kota yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/ kota yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota	GRK		IKL	IKU	0,19
2	11	03	2,03	0012	Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/ kota	kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/ kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/ kota	GRK	IKA			0,02
2	11	03	2,03	0013	Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/ kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/ kota yang dilaksanakan					0,05
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)													

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN	K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas
2	11	04	2,01	0001	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati kabupaten/ kota	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Rencana Induk Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun					0,03
2	11	04	2,01	0003	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati kabupaten/ kota	Pengelolaan Kebun Raya	Kebun Raya yang Dikelola	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan kabupaten/ Kota					0,00
2	11	04	2,01	0004	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati kabupaten/ kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan kabupaten/ kota					0,01
2	11	04	2,01	0006	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati kabupaten/ kota	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Meningkatnya Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati					0,05
2	11	04	2,01	0007	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati kabupaten/ kota	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola					0,03
2	11	04	2,01	0008	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati kabupaten/ kota	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya	Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan kabupaten/ Kota					0,00
2	11	04	2,01	0009	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati kabupaten/ kota	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan kabupaten/ Kota					0,00
2	11	04	3,01	0009	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati kabupaten/ kota	Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati tingkat kabupaten/ kota	Tersedianya Dokumen Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati tingkat kabupaten/ kota	Jumlah dokumen penilaian dan evaluasi terhadap pengelolaan keaneekaragaman hayati tingkat kabupaten/ Kota					0,00
2	11	04	4,01	0009	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati kabupaten/ kota	Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati tingkat kabupaten/ kota	Tersedianya Dokumen Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati tingkat kabupaten/ kota	Jumlah dokumen penilaian dan evaluasi terhadap pengelolaan keaneekaragaman hayati tingkat kabupaten/ Kota					0,00

PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN	K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas
2	11	05	2,01	0001	Penyimpanan sementara Limbah B3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					0,00
2	11	05	2,01	0002	Penyimpanan sementara Limbah B3	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Terlaksananya Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3					0,00
2	11	05	2,01	0003	Penyimpanan sementara Limbah B3	Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/ kota	beroperasinya sarana dan Prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/ kota	jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/ kota yang dilakukan pemeliharaan					0,00
2	11	05	2,01	0004	Penyimpanan sementara Limbah B3	Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/ kota	tersedianya sarana dan Prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/ kota	jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/ kota yang tersedia					0,00
2	11	05	2,02	0001	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/ kota	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		IKA			0,00

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN	K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas
2	11	05	2,02	0002	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/ kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan / atau Penimbunan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan / atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/ atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda kabupaten/ kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya		IKA			0,05
2	11	05	2,02	0003	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/ kota	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/ kota	beroperasinya sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/ kota	jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/ kota yang dilakukan pemeliharaan					0,00
2	11	05	2,02	0004	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/ kota	Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/ kota	terlaksananya pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/ kota	jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina					0,04
2	11	05	2,02	0005	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/ kota	Pengadaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/ kota	tersedianya sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/ kota	jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/ kota yang tersedia					0,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP(PPLH)													
2	11	06	2,01	0001	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ Kota	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan / atau Izin PPLH	Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/ atau Pemenuhan Ketentuan persetujuan Teknis, persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan / atau persetujuan Teknis, persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	GRK			IKU	0,20

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN	K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas
2	11	06	2,01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ Kota	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Seluruh Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi		IKA			0,06
2	11	06	2,01	0006	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ Kota	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang dibentuk	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD					0,03
2	11	06	2,01	0007	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ Kota	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya					0,04
2	11	06	3,01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/ kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	Terlaksananya Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/ kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	Jumlah dokumen analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/ kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan	GRK	IKA	IKL		0,40

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN	K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas
2	11	06	4,01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/ kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	Terlaksananya Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/ kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	Jumlah dokumen analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/ kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan	GRK	IKA	IKL		0,40
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKATHUKUM AD AT(MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAITDENGAN PPLH													
2	11	07	2,01	0001	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	GRK	IKA	IKL		0,22
2	11	07	2,02	0001	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan					0,05
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUPUNTUK MASYARAKAT													
2	11	08	2,01	0002	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah kabupaten/ kota	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan					0,07

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN	K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas
2	11	08	2,01	0003	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah kabupaten/ kota	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat / Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	GRK	IKA			0,05
2	11	08	2,01	0004	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah kabupaten/ kota	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat					0,05
2	11	08	2,01	0005	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah kabupaten/ kota	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat / komunitas / kelompok masyarakat	Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat / komunitas / kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/ kota yang terdaftar di kabupaten/ kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal / lembaga masyarakat / komunitas / kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH					0,07
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUPUNTUK MASYARAKAT													
2	11	09	2,01	0001	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah kabupaten/ kota	Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan / Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan /Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan / Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH					0,05
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP													
2	11	10	2,01	0003	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabuoaten / Kola	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/ kota	Diselesaikannya kasus tindak pidana lingkungan hidup yang merupakan kewenangan kabupaten/ kota sampai P-21	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/ kota					0,02

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN	K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas
2	11	10	2,01	0004	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / Kota	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat kabupaten/ kota	Penanganan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat kabupaten/ kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/ditangani					0,02
2	11	10	2,01	0005	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / Kota	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota	Diselesaikannya sengketa lingkungan hidup yang ditangani baik Melalui Pengadilan ataupun di Luar Pengadilan yang merupakan kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota	GRK			IKU	0,24
2	11	10	2,01	0006	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / Kota	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota	Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/ kota					0,02
2	11	10	2,01	0007	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / Kota	Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNSLHK Daerah	PPNSLHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPNSLHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya					0,08
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN													
2	11	11	2,01	0004	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat					0,00

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN	K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas
2	11	11	2,01	0005	Pengelolaan Sampah	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada					0,03
2	11	11	2,01	0007	Pengelolaan Sampah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA kabupaten/ Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir					0,00
2	11	11	2,01	0008	Pengelolaan Sampah	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/ kota	Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/ kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/ kota yang disusun dan ditetapkan	GRK	IKA			0,21
2	11	11	2,01	0009	Pengelolaan Sampah	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik					0,01
2	11	11	2,01	0010	Pengelolaan Sampah	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus Jumlah sampah pada kondisi khusus yang ditangani	GRK	IKA			0,03

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN	K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas
2	11	11	2,01	0011	Pengelolaan Sampah	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/ kota	Tersusunnya laporan pemantauan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah kabupaten/ kota	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/ kota					0,02
2	11	11	2,01	0012	Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan					0,02
2	11	11	2,01	0013	Pengelolaan Sampah	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Kegiatan pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah yang dilaksanakan	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali					0,02
2	11	11	2,01	0014	Pengelolaan Sampah	Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/ atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya	Tersedianya dan beroperasinya sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/ atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya	Jumlah sarana pemilahan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dan/ atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya					0,01
2	11	11	2,01	0015	Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik					0,01
2	11	11	2,01	0016	Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah					0,02
2	11	11	2,01	0017	Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan					0,02

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN	K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas
2	11	11	2,01	0018	Pengelolaan Sampah	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah yang dilaksanakan	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah					0,02
2	11	11	2,01	0019	Pengelolaan Sampah	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Kegiatan pengurangan sampah melalui proses pendauran ulang sampah yang dilaksanakan	Jumlah sampah yang terdaur ulang					0,02
2	11	11	2,01	0020	Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/ kota atau TPA/TPSTRegional	Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/ kota atau TPA/TPSTRegional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/ kota atau TPA/TPSTRegional	GRK	IKA		IKU	0,02
2	11	11	2,01	0021	Pengelolaan Sampah	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/ Kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/ kota	j umlah dokumen kerj asama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/ kota termas uk untuk pengelolaan sampah kabupaten/ kota yang ditetapkan	GRK	IKA			0,21
2	11	11	2,02	0001	Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Diterbitkannya Rekomendasi Atas Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/ persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi					0,00
2	11	11	2,03	0001	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah					0,00
2	11	11	2,03	0002	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Penilaian Kinerja Unit / Usaha / Swasta / Kelompok M asy arakat / Lembaga dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit / Usaha / Swasta / Kelompok M asy arakat / Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja					0,01

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN	K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas
2	11	11	2,03	0003	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah kabupaten/ Kota					0,02

D. Urusan Pertanian Kabupaten/ Kota

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN	K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN													
3	27	02	2,01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	GRK	IKA			0,89
3	27	02	2,01	0002	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	T erlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	GRK	IKA			0,84
3	27	02	2,01	0003	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	GRK				0,45
3	27	02	2,01	0004	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek	Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk Setek yang diperbanyak	GRK				0,43
3	27	02	2,01	0005	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan					0,00
3	27	02	2,01	0006	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan					0,00
3	27	02	2,01	0007	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura					0,00
3	27	02	2,01	0008	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Tersedianya benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang					0,00
3	27	02	2,01	0009	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Tersedianya benih bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura B erbentuk B atang yang diperbanyak	GRK				0,00

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN	K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas
3	27	02	2,01	0010	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Tersedianya benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Jumlah benih bersertifikat P erkebunan B erbentuk Mata Tumbuh					0,00
3	27	02	2,01	0011	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Tersedianya benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji					0,00
3	27	02	2,01	0012	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan					0,00
3	27	02	2,01	0013	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Tersedianya benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek					0,00
3	27	02	2,01	0014	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Terawasinya penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	GRK	IKA	IKL		0,54
3	27	02	2,01	0015	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	Tersedianya benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak					0,00
3	27	02	2,01	0016	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	Terawasinya penggunaan sarana pascapanen hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura	GRK	IKA			0,00
3	27	02	2,01	0017	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Tersedianya benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan					0,00
3	27	02	2,02	0002	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Meningkatnya Kualitas SDG Hewan / Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman					0,00
3	27	02	2,02	0003	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	T ermanfaatkannya SDG Hewan / Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan / Tanaman	GRK	IKA	IKL	IKU	1,39

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN	K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas
3	27	02	2,02	0004	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian					0,00
3	27	02	2,02	0005	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG hewan	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian					0,00
3	27	02	2,03	0001	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Terwasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan / Pakan / Tanaman Skala Kecil	GRK	IKA			0,68
3	27	02	2,03	0002	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Terwasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	GRK		IKL		0,74
3	27	02	2,04	0001	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar					0,00
3	27	02	2,04	0002	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Terlaksananya Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak					0,00
3	27	02	2,05	0002	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten / Kota	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Terlaksananya Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak					0,00
3	27	02	2,05	0004	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten / Kota	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Terjaminnya Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar					0,00

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN	K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas
3	27	02	2,05	0006	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten / Kota	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Terawasinya Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	GRK		IKL		0,64
3	27	02	2,05	0007	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten / Kota	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Terawasinya peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak	Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	GRK				0,00
3	27	02	2,05	0008	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten / Kota	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Terjaminnya peredaran benih/bibit ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	GRK	IKA			0,00
3	27	02	2,05	0009	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten / Kota	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Terkendalinya penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	GRK		IKL		0,44
3	27	02	2,06	0002	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	GRK		IKL		0,54
3	27	02	2,06	0003	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain					0,00
3	27	02	2,06	0004	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain					0,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN													

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN	K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas
3	27	03	2,01	0003	Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya					0,00
3	27	03	2,01	0005	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	GRK	IKA	IKL	IKU	1,21
3	27	03	2,01	0006	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	GRK		IKL		0,64
3	27	03	2,01	0007	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan					0,00
3	27	03	2,01	0008	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan					0,00
3	27	03	2,01	0009	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Peternakan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan					0,00
3	27	03	2,01	0010	Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	terwujudkan peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan					0,00
3	27	03	2,01	0011	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan					0,00
3	27	03	2,01	0012	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan					0,00
3	27	03	2,01	0013	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan					0,00

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN	K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas
3	27	03	2,01	0014	Pengembangan Prasarana Pertanian	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten / Kota	Ditetapkannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten / Kota	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	GRK	IKA	IKL	IKU	0,57
3	27	03	2,01	0015	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten / Kota	Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten / Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	GRK	IKA	IKL	IKU	0,58
3	27	03	2,01	0016	Pengembangan Prasarana Pertanian	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	GRK	IKA	IKL		0,33
3	27	03	2,01	0017	Pengembangan Prasarana Pertanian	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	GRK	IKA	IKL		0,35
3	27	03	2,02	0002	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	GRK				0,26
3	27	03	2,02	0003	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara					0,00
3	27	03	2,02	0004	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	GRK				0,26
3	27	03	2,02	0006	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	GRK				0,26

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN	K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas
3	27	03	2,02	0008	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara					0,00
3	27	03	2,02	0009	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara					0,00
3	27	03	2,02	0010	Pembangunan Prasarana Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	GRK				0,26
3	27	03	2,02	0011	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak	Terbangunnya dan Terehabilitasinya sarana dan prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak	Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi					0,00
3	27	03	2,02	0012	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terbangun, terehabilitasi dan terpeliharanya Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara					0,00
3	27	03	2,02	0013	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Balai Inseminasi Buatan	Terbangunnya dan Terehabilitasinya sarana dan Prasarana UPTD Balai Inseminasi Buatan	Jumlah Prasarana untuk UPTD BIB yang dibangun dan direhabilitasi					0,00
3	27	03	2,02	0014	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas	Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi					0,00
3	27	03	2,02	0015	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi		IKA			0,36
3	27	03	2,03	0001	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun / Galur Ternak	Terlaksananya Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan					0,00

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN	K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas
3	27	03	2,03	0002	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Terawasinya Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun / Galur Ternak					0,00
3	27	03	2,04	0001	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	T eridentifikasi dan Ditetapkannya Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan	GRK	IKA	IKL		0,29
3	27	03	2,04	0002	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	Terkelolanya Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola	GRK	IKA	IKL	IKU	0,46
3	27	03	2,04	0003	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum					0,00
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER													
3	27	04	2,01	0003	Penjaminan Kesehatan Hewan, P enutupan dan P embukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten / Kota	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Tertanggulangnya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali					0,00
3	27	04	2,01	0004	Penjaminan Kesehatan Hewan, P enutupan dan P embukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten / Kota	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Terbentuknya kader zoonosis	Jumlah kader zoonosis					0,00
3	27	04	2,01	0005	Penjaminan Kesehatan Hewan, P enutupan dan P embukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten / Kota	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan					0,00
3	27	04	2,01	0006	Penjaminan Kesehatan Hewan, P enutupan dan P embukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten / Kota	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Terlaksananya Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanj uti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan					0,00

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN	K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas
3	27	04	2,01	0007	Penjaminan Kesehatan Hewan, P enutupan dan P embukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten / Kota	Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis	T erlaksananya manaj emen risiko zoonosis sesuai dengan status zoonosis daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis					0,00
3	27	04	2,01	0008	Penjaminan Kesehatan Hewan, P enutupan dan P embukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten / Kota	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota					0,00
3	27	04	2,02	0004	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan T eknis untuk Pemasukan dan / atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan / atau pengeluaran HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/ atau pengeluaran HPM					0,00
3	27	04	2,02	0005	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan					0,00
3	27	04	2,02	0006	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	Terawasi dan terperiksanya kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan T empat Pemeriks HPM					0,00
3	27	04	2,02	0007	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	T erkendalinya Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya					0,00
3	27	04	2,03	0001	Pengelolaan Pelayanan Jas a Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium					0,00

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN	K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas
3	27	04	2,03	0002	Pengelolaan Pelayanan Jasa a Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner					0,00
3	27	04	2,04	0002	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan					0,00
3	27	04	2,04	0004	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner					0,00
3	27	04	2,04	0005	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Terbinanya unit usaha produk hewan dal am penerapan persyaratan higiene sanitasi	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi		IKA			0,56
3	27	04	2,04	0006	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Terkelolanya Penerbitan Rekomendasi Pemasukan, Rekomendasi Pengeluaran, Sertifikat Veteriner dan SKKH/SKPH untuk HPM	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM					0,00
3	27	04	2,04	0007	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Petugas T eknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi					0,00
3	27	04	2,04	0008	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan					0,00
3	27	04	2,04	0009	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan					0,00

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN	K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas
3	27	04	2,04	0010	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik		IKA			0,42
3	27	04	2,05	0002	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	Tertanganinya Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani					0,00
3	27	04	2,05	0003	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Terlaksananya pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan					0,00
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN													
3	27	05	2,01	0001	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Tertandalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	GRK	IKA			0,40
3	27	05	2,01	0002	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	GRK	IKA	IKL	IKU	0,24
3	27	05	2,01	0003	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	GRK	IKA	IKL	IKU	0,54
3	27	05	2,01	0004	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Tertanggulangnya Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis					0,00
3	27	05	2,01	0006	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Tertanggulangnya pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	GRK		IKL	IKU	0,23

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN	K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas
3	27	05	2,01	0007	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan	Terlaksananya Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan					0,00
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN													
3	27	06	2,01	0001	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Tersusunnya Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	GRK	IKA	IKL	IKU	1,69
3	27	06	2,01	0002	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	GRK	IKA	IKL	IKU	1,84
3	27	06	2,01	0004	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikasi unit usaha Pembibitan/Budidaya Ternak	terlaksananya sertifikasi penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik di unit usaha pembibitan/ budidaya ternak	Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik					0,00
3	27	06	2,01	0005	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	GRK	IKA	IKL	IKU	3,18
3	27	06	2,02	0001	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Terlaksananya Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan					0,00
3	27	06	2,02	0002	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi					0,00

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN	K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas
3	27	06	2,02	0003	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi					0,00
3	27	06	2,02	0005	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi		IKA			0,49
3	27	06	2,02	0006	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	Terawasinya pelaksanaan izin usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi					0,00
3	27	06	2,03	0001	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen					0,00
3	27	06	2,03	0002	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi					0,00
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN													
3	27	07	2,01	0001	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya					0,00
3	27	07	2,01	0002	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya					0,00

K-URUSAN	K-BIDANG URUSAN	K-PROGRAM	K-KEGIATAN	K-SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	GRK	IKA	IKL	IKU	Bobot Prioritas
3	27	07	2,01	0003	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian					0,00
3	27	07	2,01	0005	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten / Kota	Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	GRK	IKA	IKL	IKU	0,68
3	27	07	2,01	0006	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya					0,00
3	27	07	2,01	0007	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten / Kota	Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten / kota	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya					0,00
3	27	07	2,01	0008	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk					0,00
3	27	07	2,01	0009	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	GRK	IKA	IKL	IKU	1,11
3	27	07	3,01	0007	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian di Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian di Kabupaten / Kota					0,00
3	27	07	4,01	0007	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian di Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian di Kabupaten / Kota					0,00